

Jang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPR-GR;

Jang terhormat Anggauta-anggauta DPR-GR;

Dengan memandjatkan doa sjukur jang sedalam-dalamnja kehadiran Allah S.W.T., maka pada hari ini, tanggal 16 Agustus 1967, telah dimulai permulaan tahun Sidang DPR-GR.

Dihadapan DPR-GR membentang tugas-tugas jang masih banjak, tugas-tugas jang diamanatkan oleh seluruh Rakjat Indonesia jang diwakilinja; sedang dibelakang—chususnja satu tahun jang telah lewat—kita dapat melihat hasil-hasil apa jang telah ditjapai.

Pada hari ini, kita menghadapi dua hal jang sangat penting bagi kehidupan Bangsa pada tahun jang akan datang:

Pertama: menurut ketentuan Peraturan Tata-tertib DPR-GR, maka pada permulaan tahun Sidang ini, Presiden/ Kepala Negara diwadjibkan memberikan amanat dihadapan Dewan jang terhormat ini untuk mengantarkan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Belandja mengenai tahun dinas jang akan datang. Anggaran Belandja itu, sebenarnja merupakan pula program-program kerdja kita bersama dalam tahun jang akan datang.

Pada kesempatan ini, Pemerintah menjampaikan kepada Sidang jang terhormat ini, bahwa Pemerintah telah memutuskan seperti jang telah pernah dilaporkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Djuli jang lalu kepada Sidang DPR-GR ini untuk tidak menjerahkan RAPBN 1968 pada hari ini seperti jang ditetapkan oleh ketentuan Tata-tertib DPR-GR dan baru dapat menjerahkannya pada kwartal terachir tahun ini. Adapun alasan Pemerintah untuk memutuskan demikian ini adalah karena pelaksanaan APBN tahun 1967 sampai achir Maret 1967 belum dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebidjaksanaan tahun 1968 setjara realistis-pragmatis.

Keadaan lain jang mendorong Pemerintah untuk dipertimbangkan dalam penjusunan APBN tahun 1968 itu adalah belum adanja kepastian djangka waktu bekerdja Kabinet AMPERA, ialah kapan diselenggarakannya Pemilihan Umum, jang menurut Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 harusnja dilaksanakan pada

pertengahan tahun 1968. meskipun demikian Pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan penjusunan RAPBN dengan berbagai kemungkinan, dengan harapan dalam kwartal terakhir tahun 1967 ini sudah ada ketentuan-ketentuan yang pasti, yang untuk jelasnya kami kemukakan dalam bagian lain uraian saja ini. Untuk ini semua, Pemerintah mengharapkan pengertian dan bantuan kerjasama agar supaya langkah-langkah persiapan selanjutnya dapat berjalan lebih lancar lagi.

Kedua: besok pagi, 17 Agustus 1967, Insya Allah, seluruh Bangsa Indonesia akan merayakan hari keramatnya, hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-XXII.

Sidang DPR-GR yang mulia;

Dalam rangka menjongsong peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan itu, izinkanlah kami pada kesempatan dan melalui forum ini, juga berbitjara langsung dengan Rakyat dengan tidak melepaskan pertanggung-jawab kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusional.

Kami ingin sekaligus dalam kesempatan ini menjampaikan bahwa pidato-pidato Kepala Negara, yang diucapkan pada tiap hari tanggal 17 Agustus yang lalu mulai besok pagi 17 Agustus 1967—dan mungkin juga tahun-tahun berikutnya—tidak lagi diadakan, dan ditjukupkan dengan pidato kenegaraan yang kami ucapkan sekarang ini, pada tiap tanggal 16 Agustus didepan Sidang DPR-GR pada permulaan masa Sidangnya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air, dimanapun Saudara-saudara berada;

Besok pagi, Insya Allah, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-XXII. Panjang dan berat perjalanan yang kita tempuh; banjak suka dan duka telah kita alami, kegembiraan dan kesedihan, hasil-hasil nyata dan kegagalan-kegagalan, rongrongan dari luar dan dari dalam telah mentjoba kita, penjelewengan-penjelewengan yang hampir-hampir menghantjurkan tubuh kita, banjak pengorbanan telah kita berikan untuk menegakkan, membela dan mengisi kemerdekaan ini.

Sebagian pengorbanan itu adalah pengorbanan yang memang langsung dituntut oleh perjuangan; tetapi sayang, ada pula sebagian pengorbanan yang lain, yang tidak langsung dituntut oleh kebutuhan perjuangan, melainkan timbul karena adanya penjeleengan terhadap kemurnian jiwa-jiwa perjuangan dan kemerdekaan. Setiap perjuangan memang menuntut kerelaan kita untuk berkorban; akan tetapi, kitapun harus berusaha sekuat tenaga untuk menjegah pengorbanan-pengorbanan yang tidak perlu. Inilah seni perjuangan.

Lebih-lebih pula harus selalu diingat, bahwa akibat-akibat pengorbanan itu untuk sebagian dipikul oleh beban penderitaan Rakyat banyak yang memang masih terlalu berat. Hal ini tidak berarti, bahwa kita takut berkorban untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi naluri hidup Rakyat dan Bangsa kita; ataupun menegakkan prinsip yang menjamin kelangsungan hidup Rakyat, Bangsa dan Negara.

Marilah kita menjelang peringatan hari Proklamasi yang keramat ini, menundukkan kepala dengan chidmat, memandjatkan permohonan kehadirat Allah S.W.T., semoga arwah para pedjuang kemerdekaan, semua arwah pahlawan yang memperthankan kemerdekaan, semua arwah Pahlawan Revolusi, semua arwah Pahlawan Ampera, diberi-Nya tempat yang lajak sesuai dengan keluhuran jiwa-jiwa perjuangan dan pengorbanannya. Kepada para djanda, jatim-piatu dan keluarga yang ditinggalkannya, semoga selalu mempunjai keteguhan iman.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Pada saat-saat yang penting ini, marilah kita sekali lagi mendalami lagi jiwa-jiwa, tudjuan dan dasar perjuangan kemerdekaan kita.

Marilah kita melihat posisi kita saat ini dalam perdjalanannya hidup kita sebagai Bangsa yang merdeka, marilah kita menengok kebelakang melihat pengalaman-pengalaman kita, untuk kemudian menentukan rentjana-rentjana kedepan, dalam perdjalanannya mentjapai jiwa-jiwa dan tudjuan kita bersama.

Menengok sedjarah kebelakang adalah sangat perlu, agar kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita sendiri, mengetahui kelemahan-kelemahan kita sendiri, mengetahui kebenaran-kebenaran tindakan kita sendiri.

Kesalahan dan kelemahan harus kita tinggalkan dan kita bersihkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan datang.

Saudara-saudara sekalian;

Balans yang kita buat pada peringatan 17 Agustus kali ini mempunyai arti yang sangat penting; karena justru kita telah mulai merintis lembaran baru sejarah kita, karena kita telah mulai berhasil menanamkan kembali landasan-landasan yang penting dan prinsipil. Landasan-landasan yang penting itu adalah landasan-landasan ideologi, ketata-negaraan dan sikap mental; yaitu landasan perjuangan Orde-Baru. Landasan ideologi Orde-Baru tidak lain adalah Pantja-Sila; landasan ketata-negaraan Orde-Baru tidak lain adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan sikap mentalnya adalah kemurnian pengabdian kepada kepentingan Rakyat banyak; yang kesemuanya kita bersihkan kembali dari segala bentuk penjelewengan, ataupun penunggangan untuk kepentingan yang lain daripada kepentingan Rakyat.

Tjita, kemauan dan kepentingan Rakyat inilah yang harus kita laksanakan; sebab kemerdekaan kita sekarang adalah wujud tjita-tjitanja Rakyat, kemerdekaan ini harus diisi dengan kebahagiaan bagi Rakyat, bahwa Rakyat memang berhak mendapatkan kebahagiaan itu, karena Rakyat memang bangkit menegakkan kemerdekaan itu, karena Rakyat memang telah ratusan tahun mengimpikan dan memperjuangkan kemerdekaan ini sebagai alat untuk mentjapai kebahagiaan lahir dan bathin sesuai dengan kehormatan dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Disamping sebagai alat, maka kemerdekaan adalah masalah yang prinsipil. Kemerdekaan dan kebahagiaan adalah loro-loroning atunggal; kemerdekaan belaka tanpa isi kebahagiaan tidak ada artinya, sebaliknya kebahagiaan materiil tanpa kemerdekaan bukanlah kebahagiaan yang sempurna.

Saudara-saudara sekalian;

Setiap Bangsa yang merdeka, setiap Bangsa yang ingin mempertahankan kemerdekaannya, setiap Bangsa yang ingin mengisi kemerdekaan, setiap Bangsa yang ingin kuat hidupnya; selalu harus mempunyai landasan sebagai pegangan hidup, mempunyai falsafah. Dengan pegangan hidup itu, sesuatu Bangsa dapat kuat, tidak

terombang-ambing dalam perjalanannya; karena dengan falsafahnya itu jelas pula tujuannya.

Oleh karena pegangan hidup itu adalah pegangan hidup bagi seluruh Bangsa, maka pandangan hidup itu pun harus diterima oleh seluruh Bangsa itu sendiri. Pandangan hidup Bangsa, falsafah hidup Bangsa, adalah tjermin kebudayaannya, adalah tjermin keluhuran budinya, adalah tjermin kepribadiannya; jang berurat-berakar dari sedjarahnja sendiri.

Pandangan hidup Bangsa Indonesia, merupakan totalitas dan integritas keseluruhan kepribadiannya sebagai Bangsa, ber-bhinneka-tunggal-ika; berbeda-beda tetapi satu.

Siapun tidak bisa memungkiri anugerah tjiptaan Tuhan; bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai adat-istiadat dan kebudayaan daerah, terdiri dari ribuan pulau besar dan ketjil dengan ke-chususannya kekajaan dan keindahan alamnya. Inilah kenyataan ke-bhinneka-an Indonesia. Ke-bhinneka-an ini bukan untuk dipertentangkan, sebab memang tidak bertentangan. Ke-bhinneka-an ini djustru harus dipersatukan, sebab seluruh Bangsa Indonesia memang menginginkan persatuan; persatuan Bangsa jang timbul dari persamaan sedjarah dan nasib, jang akhirnya persatuan Bangsa jang menghasilkan persamaan tujuan.

Dasar falsafah itu harus merupakan pokok-pokok pandangan hidupnya, pokok-pokok nilai jang dipandangnja luhur dan dapat membimbingnja kearah kebahagiaan.

Untuk Bangsa Indonesia keluhuran pandangan hidup itu, falsafah hidupnya, adalah Pantja-Sila. Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, sila Peri-Kemanusiaan jang adil dan beradab, sila Kebangsaan jang mempersatukan suku-suku di Indonesia, sila Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan sila Keadilan Sosial, adalah sila-sila jang mentjerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, adalah pandangan hidup jang berurat-akar dalam kalbunya Bangsa Indonesia, adalah merupakan tjiri-tjiri menondjol kepribadian Indonesia.

Saudara-saudara sekalian;

Pantja-Sila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, pandangan hidup jang disetujui oleh wakil-wakil Rakjat, mendjelang dan sesudah Proklamasi kemerdekaan kita; oleh karena itu, Pantja-Sila adalah satu-satunja pandangan hidup jang dapat pula mempersatukan kita.

Pantja-Sila adalah perdjandjian luhur seluruh Rakjat Indonesia jang harus selalu kita djundjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanja!

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Sesuatu Bangsa jang akan hidup terus memerlukan satu wadah, satu perumahan, ialah negara. Dalam perumahan Bangsa itulah kita mengatur hidup keluarga besar Bangsa kita; dalam negara itulah kita atur tata-tertib hidup kita, kita atur rumah tangga kita menurut aturan-aturan dasar jang kita setuju bersama pula. Pokok-pokok aturan tata-tertib itu tertuang dalam Undang-undang Dasar. Keseluruhan djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar itu harus pula merupakan tjermin daripada pandangan hidup Bangsa, jang djuga mendjadi falsafah negara. Undang-undang Dasar kita, Undang-undang 1945, merupakan pentjerminan Pantja-Sila sebagai dasar falsafah negara kita.

Sebagai kelandjutan dari pandangan hidup Pantja-Sila, dalam tata pergaulan hidup duniawi, negara kita berpangkal tolak dari sistim kekeluargaan.

Tjita-tjita luhur Negara kita, tegas dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, jaitu: "Melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Tjita-tjita luhur inilah tudjuan jang akan ditjapai oleh Bangsa Indonesia.

Bertolak dari pandangan hidup Pantjasila itu, maka Negara kita berkewadajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Tanah-Air. Djadi Negara harus mengatasi faham golongan atau perseorangan; Negara harus mewudjudkan persatuan seluruh Bangsa Indonesia.

Negara harus mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat.

Negara kita berdasarkan atas Kedaulatan Rakyat dan berdasar permusjawaratan perwakilan.

Negara kita berdasar atas Ketuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Saudara-saudara sekalian;

Djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945, chususnja mengenai tjita-tjita Negara, pokok-pokok fikiran tentang negara dan sistim Pemerintahan Negara djelas langsung bersumber dan merupakan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah satu rangkaian; oleh karena itu mempertahankan Pantja-Sila berarti djuga mempertahankan pokok-pokok fikiran jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 itu.

Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 itulah fungsi dan tudjuan Orde-Baru. Setiap insan Indonesia, setiap organisasi, setiap bentuk usaha apapun jang menamakan dirinja Orde-Baru harus menerima dua landasan pokok Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; tidak sadja menerima tetapi harus mengamalkan dan memberi isi pada Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 sebenar-benarnja, setepat-tepatnja, semurni-murninja sesuai dengan djiwa dan semangatnja.

Dengan demikian, Orde-Baru tidak lain adalah tatanan seluruh peri-kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara jang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kami garis bawah di sini kata-kata “diletakkan kembali”, karena Orde-Baru lahir dan tumbuh sebagai reaksi dan untuk mengadakan koreksi total atas segala bentuk penjelewengan jang dilakukan pada masa Orde jang berkuasa waktu itu, jaitu jang sekarang disebut Orde-Lama.

Penjelewengan terhadap Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 jang telah terdjadi pada masa Orde-Lama, telah membawa akibat jang sangat luas dan mendalam; bahkan merusak sendi-sendi kehidupan Bangsa dan Negara.

Pantja-Sila telah diselewengkan, dan kehilangan kemurniannya dengan dilahirkannya konsepsi Nasakom, yang mengikutkan dan memasukkan komunisme kedalam pelaksanaan Pantja-Sila. Komunisme, yang didasarkan pada dialektika materialisme, jelas anti Tuhan; sedangkan Pantja-Sila ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama diselewengkan untuk kepentingan politik.

Sila Peri-kemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan; hak-hak azasi manusia hampir-hampir lenjap, sebab semuanya ditentukan oleh kemauan penguasa. Dijaminan dan perlindungan hukum hampir tidak ada. Ini semua disebabkan karena tindakan-tindakan kita tanpa atau dengan sadar masuk dalam jaringan strategi PKI, yang menerima Pantja-Sila hanya sekedar sebagai alat untuk kemudian merebut kekuasaan setjara mutlak dalam rangka komunisme internasional.

Sila Kebangsaan dan persatuan dalam praktiknya luntur, karena ada aliran-aliran yang menundukkan diri kepada kepentingan dan ideologi lain. Semangat persatuan terpetjah-belah karena ajaran-ajaran kontradiksi dan perjuangannya kelas. Perpetjahan dan tidak kesepakatan dalam prinsip dan tindakan terdapat dalam pimpinan, yang saling berlomba dengan segala jalan untuk memperoleh jalan mentjapai tujuannya, dengan kalau perlu, “mendjual ketjap” kepada pimpinan Negara dan memfitnah-mendjatuhkan kawan sedjawatnja. Ini semua memberikan peluang bagi PKI untuk mempopulerkan dirinya, seolah-olah ialah yang paling benar dan pembela kepentingan Rakjat.

Bangsa Indonesia tidak mengenal kelas, sebab kita memang tidak berkelas-kelas dan tidak akan berkelas-kelas.

Sila Kedaulatan Rakjat menjadi kabur; yang ada adalah “kedaulatan” pemimpin.

Sila Keadilan Sosial makin djauh; sebab kekajaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk projek-projek “mertju-suar” yang merusak ekonomi Rakjat dan Negara. Sistim “ekonomi-terpimpin” dalam praktek menjadi “sistim-lisensi” yang hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan penguasa.

Penjelewengan serius terhadap Undang-undang Dasar 1945 terjadi dengan memusatnja kekuasaan setjara mutlak pada satu tangan, jaitu Kepala Negara. Azas dan sendi Negara hukum lambat-laun ditinggalkan, sehingga achirnja mendjadi negara jang berdasarkan kekuasaan. Azas dan sendi sistim konstitusi, dalam praktek berubah sehingga bersifat absolutisme. Kekuasaan Negara jang tertinggi bukan lagi ditangan MPR(S), melainkan berada ditangan Pemimpin Besar Revolusi. Presiden bukannya tunduk kepada MPRS; bahkan sebaliknya MPRS jang ditundukkan dibawah Presiden.

Sungguh suatu tragedi bagi Rakjat dan Bangsa Indonesia jang pada tahun 1959 mendukung dengan penuh harapan “dekrit kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”, tetapi ternjata bahkan mendjerumuskan Rakjat dan Bangsa Indonesia, kepada penderitaan lahir dan bathin, jang mentjapai klimaksnja dengan pemberontakan G-30-S/PKI.

Sidang DPR-GR jang terhormat;

Apabila kami dalam kesempatan ini mengemukakan setjara terperintji bentuk-bentuk penjelewengan Orde-Lama, itu adalah sekedar mengingatkan pada kita, bahwa Orde-Baru jang bertekad mengadakan perbaikan-perbaikan jang menjeluruh, mengadakan ordening-ordening penertiban dalam melaksanakan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak akan lagi mengulangi, tidak terdjerumus lagi kedalam keadaan praktek-praktek jang demikian buruknja itu.

Marilah kita nilai posisi sekarang ini dengan melihat pada hasil-hasil, sikap serta garis kebidjaksanaan dalam pelaksanaan tugas pokok Kabinet Ampera hingga saat ini, tugas pokok jang telah digariskan dan ditetapkan oleh MPRS atas nama seluruh Rakjat Orde-Baru.

Tugas pokok Kabinet Ampera, jaitu mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, tidak lain adalah pelaksanaan pembinaan Orde-Baru dalam berbagai lapangan kehidupan.

Kami ingin menekankan, bahwa Orde-Baru itu memang belum terwujud sekarang. Orde-Baru baru terwujud nanti sesudah terbentuknja MPR hasil Pemilihan

Umum jang akan datang, jang akan mengangkat Presiden, jang selandjutnja membentuk Pemerintahan Baru.

Program-program stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi jang dijalankan Kabinet Ampera sekarang adalah mengantarkan, mentjiptakan kondisi-kondisi jang kuat bagi terwujudnja Orde-Baru itu. Hal ini berarti, bahwa setapak demi setapak kemurnian pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 harus terus menerus kita lakukan dan memang telah kita laksanakan disemua bidang atas dasar landasan jang kuat dan kita sepakati bersama.

Saudara-saudara sekalian;

Pembinaan Orde-Baru mempunjai landasan jang tetap tidak berubah ialah landasan Idiil Pantja-Sila dan landasan Konstitusionil Undang-undang Dasar 1945, jang memang itulah jang mendjadi jiwa, semangat dan naluri dari Orde-Baru.

Disamping landasan jang bersifat tetap itu, maka pembinaan Orde-Baru mempunjai landasan-landasan situasionil, jaitu landasan-landasan jang harus didjadikan dasar bekerdja dan perdjungan sampai terbentuknja Pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum jang akan datang.

Landasan-landasan situasionil itu adalah landasan-landasan jang diberikan oleh MPRS, melalui ketetapan-ketetapannja, jang meliputi:

Pertama: Landasan Struktural, jaitu Kabinet Ampera dengan seluruh alat Pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah sampai ke Desa-desa dan Kampung-kampung, dengan ditegaskan dan dilengkapi dengan landasan Kedua: Landasan Kepemimpinan jaitu seperti jang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. IX dan Ketetapan MPRS No. XXXIII ialah kepemimpinan Nasional—Pembina Orde-Baru—Pimpinan eksekutif ditangan Supersemar dan Pedjabat Presiden.

Kemudian landasan Ketiga: Landasan Program, jaitu Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera, seperti diatur dalam Ketetapan MPRS No. XIII. Hal ini berarti, bahwa berhasilnja tugas pokok dan program-program Kabinet bukan semata-mata mendjadi tanggung djawab Pemerintah belaka, melainkan djuga harus didukung, dibantu dan dilaksanakan oleh seluruh Rakjat dalam bidang tugas masing-

masing, oleh karena tugas dan program Kabinet Ampera adalah ditetapkan oleh Rakjat sendiri.

Seterusnja Kabinet Ampera dengan melihat berat dan luasnja tugas jang dibebankan dipundaknja serta diikatkan pada djangka waktu jang tidak tjukup lama (+ dua tahun) dan jang harus mulai bekerdja dengan alat dan keadaan jang serba tidka ada dan serba tidak beres, jang diwariskan oleh Orde-Lama, dipaksa memulai tujanja dengan terlebih dulu menemukan landasan pelaksanaan-landasan operasionil jaitu landasan Keempat: Strategi-Dasar Kabinet Ampera jang diusahakan setjara tjermat menentukan sasaran-sasaran strategis jang harus ditjapai dalam djangka waktu tertentu, agar supaja tugas pokok—sasaran achir—Kabinet Ampera jaitu stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi dapat terwujud tepat pada waktunja.

Saudara-saudara se-Bangsa dna se-Tanah-Air;

Djelas kiranja bahwa landasan-landasan pembinaan Orde Baru itu langsung bersumber pada Ketetapan MPRS, ketetapan Rakjat melalui wakil-wakilnja. Kita telah bertekad mengamalkan Pantja-Sila, kita telah bertekad melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, maka langkah pertama jang harus dimulai adalah disiplin untuk melaksanakan Putusan-putusan kita sendiri, Keputusan-keputusan MPRS itu.

Keputusan-keputusan MPRS itu adalah merupakan kebulatan pendapat dan kesepakatan kita bersama, maka kitapun harus bulat pendapat dan bersepakat dalam melaksanakannja. Untuk ketertiban dalam pelaksanannja, maka Kabinet Ampera telah menggariskan kebidjaksanaan untuk melakukan penertiban disegala bidang, jang dewasa ini telah meningkat sedemikian rupa sehingga dapat setjara djelas dan sistematis dirumuskan dalam usaha-usaha mentjiptakan Pantja Tertib.

Tertib pertama ialah tertib Politik, jang mempunjai arti, bahwa kita semua harus mentjiptakan kehidupan Politik jang tertib, kehidupan politik jang sesuai dengan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, kehidupan politik jang demokratis dan konstitusionil sesuai dan didjiwai oleh Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Pantja-Sila, yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. demokrasi Pantja-Sila berarti Demokrasi, kedaulatan Rakyat yang didiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan Bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pantja-Sila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong-rojong.

Karena pangkal bertolak demokrasi Pantja-Sila adalah kekeluargaan dan gotong-rojong, maka demokrasi Pantja-Sila tidak mengenal kemutlakan golongan, baik kemutlakan karena kekuatan fisik, kemutlakan karena ekonomi, kemutlakan karena kekuasaan, maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara.

Kehidupan demokrasi Pantja-Sila tidak boleh diarahkan untuk semata-mata mengedjar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri; apalagi ditujukan untuk mematikan golongan yang lain, selama golongan-golongan ini termasuk dalam warga Orde-Baru, warga Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. azas demokrasi Pantja-Sila sebenarnya telah diatur setjara konstitusional, ialah mengikut-sertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasjarakatan dengan jalan musjawarah untuk mufakat.

Dalam bidang ketata-negaraan, dimana ditentukan pembagian tugas dan kekuasaan dalam membina dan mengemudikan Negara, oleh Undang-undang Dasar 1945 telah diatur setjara tertib dan bidjaksana dalam bentuk kelembagaan. Azas kedaulatan Rakyat dilembagakan pada MPR yang tugas dan kekuasaannya membuat Undang-undang Dasar, merumuskan haluan negara serta menundjuk Mandatarisnya, Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Mandataris MPR/Kepala Negara yang telah ditundjuk berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas memimpin Negara, dengan sendirinya dibatasi dan diikat oleh Ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-

undang Dasar 1945. untuk ini ia bertanggung-djawab kepada MPR jang memberikan mandatnja.

Kemudian tugas pengawasan oleh Rakjat terhadap Pemerintah dititik-beratkan kepada pengawasan oleh lembaga konstitusionil Dewan Perwakilan Rakjat. Untuk itu ia diperlengkapi dengan berbagai sarana dan alat, jang terutama adalah persetujuan dalam membuat peraturan-peraturan Negara sesuai dengan haluan jang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk Undang-undang dan dalam menentukan pendapatan dan belandja Negara; pengawasan atas tindakan Pemerintah dilakukan pula oleh Rakjat melalui DPR dengan djalan mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan penjelidikan, mengajukan amandemen, mengajukan usul-usul, pernyataan pendapat atau usul-usul lain, mengenai seseorang atau sesuatu masalah. Tentunja fungsi pengawasan oleh DPR ini, dilakukan bukan untuk menghambat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, melainkan harus dilakukan dalam suasana dan djiwa kerdjasama, membantu dan mengingatkan Pemerintah akan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan jang ada, dalam semangat konsultasi, komunikasi untuk mentjapai kemadjuan-kemadjuan.

Chusus dalam melaksanakan pengawasan dibidang keuangan, disamping dalam penentuan anggaran, dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran, DPR-GR dibantu oleh aparat khusus untuk itu ialah Badan Pengawas Keuangan.

Dengan demikian djelaslah, bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan DPR-GR sebagai aparat pengawas, sehari-hari harus selalu bekerdja sama sesuai dengan sistim Undang-undang Dasar 1945. Memang kehidupan demokrasi Pantja-Sila, tidak mengenal golongan oposisi seperti jang dikenal oleh sistim demokrasi liberal; demokrasi Pantja-Sila hanja mengenal musjawarah untuk mufakat melalui perwakilan-perwakilan baik di DPR maupun MPR. Dalam hubungan ini, perlu kita sadari benar-benar, bahwa sistim ketata-negeran menurut konstitusi Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa kekuasaan Pemerintahan sepenuhnya ada dalam tangan Presiden, jang mempertanggung-djawabkannja kepada MPR, sedangkan para

Menteri-menteri Negara adalah pembantu-pembantu Presiden jang bertanggung-djawab kepada Presiden.

Saudara-saudara sekalian, Sidang jang mulai;

Apabila kami dalam kesempatan ini menguraikan setjara luas mengenai pembagian fungsi dan kekuasaan diantara lembaga-lembaga konstitusionil, ini bukanlah maksud kami untuk menggurui sidang jang mulai ini; kami hanja ingin mengingatkan kepada kita sekalian jang mendapatkan kepertjajaan dan memikul tanggung-djawab kepada Rakjat dibidangnja masing-masing, agar supaja tetap ingat akan fungsi masing-masing sesuai perangkat dan djiwa Pantja-Sila serta konstitusi, untuk tidak menjeleweng kembali seperti jang dilakukan oleh Orde-Lama; djustru karena kita dewasa ini sedang dalam fase menertibkan, maka kita baik sebagai individu-individu maupun sebagai anggauta jang bertanggung-djawab dalam hubungan kelembagaan, harus benar-benar memegang teguh “norma-norma permainan” jang telah ditentukan oleh konstitusi jang didjiwai oleh Pantja-Sila.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam demokrasi Pantja-Sila pelaksanaan hak-hak azasi manusia didjamin sepanjang tetap dalam batas-batas Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; oleh karena itu penghidupan kepartaian didjamin pula, djustru untuk memberikan wadah jang sehat dan konstruktif bagi hak-Rakjat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan fikiran. Partai Politik adalah untk melaksanakan prinsip “kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan”, seperti jang ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. sebagai alat demokrasi, partai politik harus pula memiliki serangkaian tanggung-djawab seperti jang kami sebut diatas.

Tata-pergaulan politik dalam tubuh partai sendiri dan tata pergaulan politik antara partai-partai politik harus pula bertolak dari azas kekeluargaan. Dalam kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa masalah ideologi tidak berguna untuk diperuntjing, dan tidak banjak manfaatnja bagi pertumbuhan bangsa untuk dipertentangkan satu sama lain, sebab kita semuanya telah menentukan Pantja-Sila

sebagai pandangan hidup kita, sebagai ideologi kita bersama, sebagai ideologi dari setiap partai politik dan organisasi-organisasi lainnja. Pengelompokan partai dalam kompartimentasi fisik ala masa Orde-Lama harus segera ditinggalkan; sebab watak kompartimentasi sematjam itu akan mengakibatkan timbulnja peruntjangan ideologi jang mendjadi sumber pertentangan dan tjuriga-mentjurigai.

Apabila dewasa ini masih ada pengelompokan atau penggolongan dalam golongan Agama dan golongan Sosialis Pnatja-Sila dilembaga-lembaga perwakilan, hendaknja itu sekedar untuk mengefektifkan dan menjederhanakan tata-tjara musjawarah untuk memperoleh mufakat, bukan untuk menondjolkkan kelompoknja dan ideologi politiknya karena diantara kelompok-kelompok ini (kelompok-kelompok dalam keluarga besar Orde-Baru) memang tidak ada perbedaan ideologi, hanja ada perbedaan dalam penitik-beratan program perjuangannja, program untuk mengisi kemerdekaan, program untuk mengamalkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kehidupan demokrasi Pantja-Sila untuk tingkat dewasa ini, sungguh sudah waktunja untuk meletakkan perjuangan dan gerakannya atas dasar program. Melalui forum ini saja adjak seluruh Partai-partai, Ormas-ormas dan Golongan Karya untuk berlomba menjusun program masing-masing, program pembangunan disegala bidang, untuk ditawarkan, dimusjawarahkan dalam lembaga-lembaga konstitusionil, sehingga akan terdapat satu konsensus dalam merumuskan dan menjusun program, untuk kemudian kita laksanakan bersama. Sungguh kita tidak mempunyai banjak waktu untuk mengedjar ketinggalan-ketinggalan, keterbelakangan Rakjat dan Bangsa diberbagai bidang kehidupan, untuk meningkatkan kesedjahteraan lahir-bathin dari Rakjat jang belum sempat mengenjam kenikmatan kemerdekaan kita ini. Terlebih-lebih dalam menghadapi penjelenggaraan Pemilihan Umum jang akan datang ini, kampanye untuk memenangkan Organisasi atau Partai akan sangat bermanfaat dan lebih dimengerti oleh Rakjat apabila dilandaskan pada program-programnja masing-masing, apa-apa jang akan dikedjar dan ditjapai dalam tahapan-tahapan tertentu.

Partai Politik harus merupakan wadah untuk mendidik Rakjat, dalam melaksanakan hak-hak politik dan hak-hak demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai dukungan jang riil dan luas dari Rakjat sendiri.

Bukan berarti dalam bentuk banjak djumlah partai; melainkan harus menitik-beratkan pada efektifnja pelaksanaan hak-hak demokrasi dari Rakjat setjara sehat.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXII ditegaskan, bahwa kepartaian, keormasan dan kekaryaan harus menudju kearah penjederhanaan.

Djiwa dari ketentuan tersebut adalah, bahwa kita harus mentjegah bertambah-tambahnja djumlah partai, disamping keharusan adanja usaha-usaha untuk mengefektifkan penjelenggaraan fungsi dan tugas partai bagi kehidupan demokrasi demi kebahagiaan dan kesedjahteraan Rakjat.

Bertolak dari pokok-pokok fikiran mengenai hakekat demokrasi Pantja-Sila, tugas dan fungsi partai politik seperti jang kami kemukakan tadi; maka Pemerintah menempuh kebidjaksanaan untuk masih dapat menjatudjui adanja satu partai baru, jang dewasa ini sedang sibuk diperbintjangkan dalam kalangan luas, sependjang adanja partai baru tersebut tidak bertentangan atau masih dapat dipertanggung-djawabkan dengan azas penjederhanaan kepartaian/keormasan. Adanja suatu kenjataan bahwa dewasa ini, terdapat banjak organisasi-organisasi Islam jang tidak tergabung dalam salah satu Partai Islam; mereka merasa bahwa penjaluran hak-hak politiknya dalm mengembangkan hak demokratisnja kurang dapat efektif.

Dalam rangka inilah gagasan pembentukan satu partai (Islam) baru jang menghimpun, menjalurkan dan menggabungkan semua organisasi-organisasi Islam non-partai itu patut dihargai dan dapat dibenarkan. Pembentukan partai baru jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang saja sebutkan diatas tentu tidak dapat disetudju, karena akan bertentangan dengan azas penjederhanaan.

Saudara-saudara sekalian;

Mengenai penjelenggaraan penjederhanaan kepartaian ini kemudian akan diatur dengan Undang-undang jang sedang disiapkan, jang selandjutnja akan diujdi melalui Pemilihan Umum jang akan datang; sebab dengan demikian dukungan riil

dan luas dari Rakjat akan lebih njata, kemampuan dan kesungguhan adanja akan diukur setjara objektif.

Pemilihan Umum bagi sesuatu Bangsa dan Negara jang mendjundjung tinggi azas Demokrasi sungguh merupakan ukuran barometer daripada kemampuan Bangsa itu dalam menjalurkan aspirasi Rakjat setjara demokratis dan realistis. Mendjadi ukuran daripada sampai dimana pelaksanaan azas demokrasi itu sendiri.

Namun demikian Pemilihan Umum adalah tetap suatu alat jang penggunaannja tidka boleh mengakibatkan rusaknja sendi-sendi demokrasi dan bahkan dapat menimbulkan hal-hal jang memenderitakan Rakjat, tetapi harus mendjamin suksesnja perdjungan Orde-Baru jaitu tetap tegaknja Pantja-Sila dan dipertahankannja Undang-undang Dasar 1945, terwujudnja Orde-Baru.

Kita semua dewasa ini sedang bersiap-siap untuk menghadapi Pemilihan Umum, jang menurut ketentuan jang berlaku sesuai dengan Ketetapan MPRS harus diselenggarakan pertengahan tahun 1968. apakah ketentuan waktu tersebut dapat dipenuhi atau tidak, adalah mendjadi kompetensi MPRS untuk memutuskannja.

Dalam hubungan ini Pemerintah hanja akan mengadjukan pertimbangan, agar supaya penjelenggaraan Pemilihan Umum memberikan djangka waktu setjara wadjar untuk melakukan persiapan-persiapan jang diperlukan, setelah Undang-undangnja dapat dikeluarkan, ajng dewasa ini sedang dibahas oleh DPR-GR bersama Pemerintah dan telah terlambat lebih dari enam bulan dari waktu jang telah ditentukan.

Selandjutnja dalam membina menertibkan kehidupan politik ini, dalam mentjiptakan kehidupan politik jang demokratis dan konstitusionil itu peranan pers sebagai manifestasi dari penggunaan hak-hak azasi manusia djelas mendapatkan tempat jang penting dan tidak boleh dilupakan. Untuk itu kita telah berhasil memiliki Undang-undang Pokok Pers. Namun demikian penggunaan hak kebebasan pers ini sungguh perlu ditertibkan dalam arti bahwa kebebasan pers itu djuga harus dapat dipertanggung-djawabkan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pantja-Sila seperti jang telah kami uraikan diatas. Hendaknja kita semua, chususnja para karyawan pers dapat menginsjafi tadjamnja pisau pers itu dalam mempengaruhi pendapat Rakjat.

Oleh karena itu sasaran daripada pemberitaan pers haruslah tepat; harus mentjerminkan sifat dan iktikad Orde-Baru, menghindari praktek-praktek pers Orde-Lama. Adalah suatu kesempatan jang mulia dan tantangan jang berat bagi para karyawan pers untuk mendjadikan penerangan-penerangan jang berguna bagi masjarakat, bermanfaat bagi pertumbuhan kehidupan demokrasi Pantja-Sila sesuai dengan djiwa dan semangat Orde-Baru.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam rangka mentjiptakan tertib politik dan dalam pelaksanaan demokrasi Pantja-Sila, maka hak beragama sesuai dengan kejakinan masing-masing harus didjamin dan dilindungi. Terlebih-lebih karena Ketuhanan Jang Maha Esa merupakan naluri hidup jang tidak dapat dipisahkan dari Rakjat dan Bangsa Indonesia dan telah mendjadi sila pertama dari Pantja-Sila.

Dalam melakukan kebebasan beragama ini, dalam kita, pemeluk-pemeluk agama melakukan ibadah keagamaan sesuai dengan kejakinan kita masing-masing, hendaknja kita tetap waspada, djangan sampai timbul perbedaan-perbedaan pendapat jang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Orde-Baru, musuh-musuh agama jaitu sisa-sisa PKI jang anti Tuhan itu, untuk mengadu-domba antara kita dengan kita.

Bangsa Indonesia sungguh-sungguh merasa bahagia, bahwa kita mempunjai tradisi jang baik mengenai toleransi dan kerukunan agama ini. Tradisi dan kenjataan inilah jang antara lain menguatkan sila Ketuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja-Sila kita; dan sebaliknya, dengan Pantja-Sila itu harus kita kembangkan toleransi agama. Bangsa kita menganut berbagai agama; namun demikian kesatuan dan persatuan tetap terpelihara. Setiap agama memang tidak memaksa seseorang mendjadi pemeluknja. Agama bertolak dari kepertjajaan ini terletak dalam dasar hatinja seseorang; oleh karena itu tidak dapat dipaksakan.

Suatu masyarakat, suatu Bangsa jang memperuntjing perbedaan agama jang ada didalamnja; akan senantiasa mengalami kesulitan-kesulitan didalam seluruh Bangsa itu sendiri, jang apabila tidak dapat dikendalikan mengakibatkan hantjurnja kesatuan Bangsa itu.

Dalam suasana Orde-Baru, dimana pelaksanaan Pantja-Sila dimurnikan, dimana telah dilarang adanya golongan yang anti agama, maka hidup keagamaan harus lebih sehat dan lebih subur. Seorang sardjana dunia yang kenamaan, mengagumi kerukunan agama di Indonesia ini; dan dikatakannya bahwa “Indonesia adalah negeri dimana agama hidup sebagai tetangga-tetangga yang baik”. Bahkan sardjana itu mengharapkan, agar negara-negara lain didunia hal ini mentjontoh Indonesia.

Marilah kita sambut harapan ini, bukan karena kita sekedar ingin dipudji, bukan karena sekedar kita menjadi tjontoh dunia; melainkan karena tradisi itu baik dan merupakan kepribadian kita pula. Dalam ruang lingkup dunia, kitapun wadajib memberikan sumbangan yang mampu kita berikan kepada terwujudnya toleransi antara agama-agama didunia umumnya.

Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama; disamping itu mewadajibkan pula adanya toleransi agama. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling azasi diantara hak-hak azasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai mahluk tjiptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.

Masalah agama yang timbul hendaknya dapat dinilai dan diselesaikan berdasarkan kematangan berfikir, kematangan ber-Pantja-Sila dan kematangan ber-agama sendiri. Djangan sampai timbul kesan, bahwa djustru dalam suasana Orde-Baru, dalam semangat memurnikan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam suasana kebebasan yang bertanggung-djawab masalah agama ini menjadi bahan perbedaan pendapat. Seluruh Bangsa telah menerima Pantja-Sila, oleh karena itu dalam seluruh wilayah Tanah Air kebebasan beragama didjamin, kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing djuga didjamin.

Sesuai dengan kebulatan kita menerima Pantja-Sila, sesuai dengan kebulatan pengertian kita tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita tidak perlu mempersoalkan mayoritas atau minoritas agama ini.

Sungguh mengharukan, sangat membesarkan hati dan patut dikembangkan; bahwa banjak tempat-tempat di Indonesia dimana geredja misalnja berdiri berdekatan dengan mesdjid; bahkan dibanjak tempat, ummat Islam bersama-sama ummat Kristen misalnja setjara bergotong-rojong mendirikan mesdjid atau gereja.

Dalam rangka toleransi agama itu, dengan sendirinja adalah bidjaksana sekali, apabila seseorang penganut agama tidak melakukan hal-hal jang terlarang bagi agama jang lain dihadapan penganut agama jang lain itu; sedangkan perbuatannja itu bukan merupakan keharusan agama.

Djuga hendaknja dapat dihindari usaha pengembangan agama jang dapat menjinggung perasaan masjarakat jang kebetulan beragama lain, bukan karena tidak senang terhadap agama jang bersangkutan, tetapi karena adanja perbedaan jang menjolok dalam lingkungan atau nilai-nilai sosial jang berlaku dalam masjarakat tersebut.

Agama adalah universil, Tuhan adalah Maha Kuasa dilangit dan dibumi jang menurunkan Agama untuk ummat manusia tjiptaan-Nya. Hubungan dengan golongan-golongan jang se-Iman dinegara-negara lain dalam negara Pantja-Sila tetap didjamin. Dalam semua hal mengenai agama, djuga dalam hubungan-hubungan dengan Luar Negeri itu, Pemerintah pada prinsipnja akan mendjalankan perlakuan jang sama terhadap agama; dan sebaliknya semua golongan agama harus pula mematuhi Undang-undang jang berlaku di Negara kita ini.

Berbitjara mengenai alat-alat demokrasi, maka partai politik merupakan salah satu alat demokrasi jang penting, meskipun bukan satu-satunja. Sesuai dengan perangkat konstitusi, disamping partai-partai politik terdapat golongan-golongan (karya) jang djuga merupakan alat demokrasi, jang perlu diwakili dalam lembaga-lembaga Perwakilan Rakjat.

Saudara-saudara jang terhormat;

Dalam perkembangan kehidupan politik dan kenegaraan sesuai dengan azas demokrasi Pantja-Sila, golongan karya jang potensiil dan mempunjai peranan jang

aktif dan besar untuk mengamankan dan menegakkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah golongan ABRI.

Besar atau ketjilnja peranan jang dipegang oleh ABRI itu tergantung pada integritas bahaja jang mengantjam keselamatan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, tergantung pada integritas bahaja jang membahayakan keselamatan Rakjat, kesatuan dan persatuan Bangsa, mengantjam kelangsungan hidup Negara, baik bahaja itu datang dari luar maupun dari dalam. ABRI tidak menutup mata kepada kenjataan sedjarah, bahwa ada oknum-oknum jang membawa kesatuan-kesatuan ABRI untuk ikut-serta dalam pemberontakan atau penyelewengan; akan tetapi sedjarah djuga mentjatat, bahwa pemberontakan dan penjelewengan-penjelewengan itu selalu ditumpas oleh ABRI sendiri.

Peranan jang disumbangkan oleh ABRI kepada perkembangan politik dan ketata-negaraan ini, kiranja mudah difahami apabila kita melihat kembali kepada kelahiran dan sedjarah pertumbuhan ABRI. ABRI lahir bersama-sama dengan meletusnja Revolusi physik, ia lahir dari anak-anak Rakjat sendiri. ABRI adalah Angkatan Bersendjata jang lahir dan tumbuh dengan kesadarannja untuk melahirkan kemerdekaan, membela kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. ABRI bukan semata-mata Angkatan Bersendjata bajaran, ABRI adalah djuga pengisi kemerdekaan; ABRI djuga berhak dan merasa wadjib ikut menentukan haluan Negara dan djalannja Pemerintahan.

Inilah sebab pokok, mengapa ABRI mempunjai dua fungsi; jaitu sebagai alat Negara dan sebagai golongan Karya. Nanti dan kapanpun djuga ABRI terus siap-siaga untuk mentjegah kembalinja Orde-Lama; terus siap-siaga mempertahankan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dari siapapun dan dari manapun bahaja itu akan datang.

ABRI tidak akan dan tidak mungkin mendjalankan diktator militer sebab djustru ABRI bersumpah pradjurit dan ber Sapta-Marga; jang menegaskan tekad ABRI membela Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peranan yang dipegang oleh ABRI bukan karena haus kekuasaan. Apabila benar ABRI ingin kekuasaan, maka ABRI sebenarnya dapat melakukan pada waktu-waktu dan kesempatan yang lalu, umpamanya pada tanggal 1 Oktober 1965; yaitu pada saat-saat ABRI menggunakan kekuasaan fisik untuk menumpas pemberontakan G-30-S/PKI beserta pendukung-pendukungnya, dimana seolah-olah ada kepanikan dan bahkan ke-vakum-an pemerintahan.

Keinginan-keinginan ABRI untuk perbaikan kehidupan politik dan ketatanegaraan justru selalu disalurkan melalui prosedur-konstitusional; inilah sebabnya ABRI mendukung dan mengamankan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS.

Kami, sebagai seorang prajurit ABRI, sebagai salah seorang Panglima Angkatan, sebagai Panglima Angkatan Darat yang oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. IX diberi kepercayaan, tanggung-djawab dan wewenang sepenuhnya untuk mengambil kebidjaksanaan dan tindakan dalam pengamanan usaha-usaha menjabai tujuan Revolusi; justru belum pernah menggunakan wewenang yang istimewa itu sedjak ditetapkan oleh MPRS.

Wewenang tersebut tidak kami gunakan, justru karena kami yakin bahwa tjara-tjara konstitusional dan hukum masih dapat digunakan untuk mengatasi keadaan.

Kami selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, justru akan mendjunjung tinggi Amanat Rakyat melalui MPRS, yaitu mengamankan kebidjaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-undang Dasar setjara murni.

Perlu difahami bersama, bahwa walaupun peranan ABRI besar, akan tetapi ABRI dalam suasana Orde-Baru ini tidak pernah mengingini peningkatan berlakunya dan digunakannya hukum-hukum militer yang mengesampingkan begitu saja hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi Rakyat. ABRI justru menghendaki dan berdjung bersama-sama Rakyat untuk menegakkan hidup berkonstitusi serta hukum positif yang ada.

Sungguh ABRI tidak hendak mendjuruskan kehidupan politik dan ketatanegaraan kearah militerisme atau sistem diktator lainnya. Sebaliknya, ABRI

mengingini kehidupan demokratis dan konstitusional; justru itu pulalah maka ABRI mempertahankan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945; dan menentang penjelewan-penjelewan dilakukan oleh Orde-Lama dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan Orde-Lama itu.

Djanganlah hendaknja terburu mengatakan adanja militerisme dewasa ini, karena banjaknja anggota ABRI—sematjam kata-kata *flow of greens* atau penghidjauan dan sebagainja, dalam kegiatan kemasjarakatan dan kenegaraan. Militerisme atau bukan militerisme hendaknja diukur dengan tertib hukum jang berlaku, dengan ada tidaknja keleluasaan dan didjaminnja hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum jang berlaku berdasarkan konstitusi; djangan diukur dengan banjaknja “Badju ABRI”.

Apabila dewasa ini banjak ABRI mendjadi Kepala Daerah, justru karena ABRI dipilih oleh DPR-GR melalui prosedur-prosedur demokrasi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum jang berlaku, maka djelas tidak berarti bahwa ABRI serakah ingin menguasai semua djabatan dan kedudukan.

Duduknja anggota ABRI dalam pelbagai lembaga-lembaga pemerintahan pada dasarnya justru karena fungsi kekaryaanja dan karena alasan-alasan teknis-efisiensi demi suksesnja usaha-usaha Pemerintah. Apabila duduknja anggota ABRI dalam sesuatu djabatan, justru akan merugikan bidang usaha jang bersangkutan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu prestasi jang diharapkan, maka ABRI siap sewaktu-waktu menariknja untuk diganti dengan tenaga lain jang lebih tjakap dan terpertjaja.

ABRI sekali-kali tidak bermaksud memonopoli sesuatu djabatan dalam Pemerintahan, djuga tidak hendak merebut dan menguasai sebanjak mungkin kursi dan bidang kegiatan. ABRI jakin sejakin-jakinnja bahwa masalah jang dihadapi bukanlah sekedar soal kursi, kekuasaan atau djabatan, melainkan masalah Nasional jang pokok adalah pengabdian jang sebesar-besarnja kepada Rakjat dan Negara, masalah mengisi kemerdekaan, memberikan kesedjahteraan kepada seluruh Rakjat dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. Dan justru untuk ini perlu digalang dan

dibina kegotong-rojongan antara potensi jang ada baik dari partai, ormas, golkar dan ABRI, saling andum gawe, bukan rebutan kursi dan kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian;

Djelas kiranja bahwa issue adanja militerisme adalah tidak beralasan, karena memang tidak benar. Issue itu bahkan berbahaya; lebih-lebih bila dilantjarkan untuk meniadakan peranan ABRI sebagai golongan karya, seperti jang dikehendaki oleh PKI dahulu.

Walaupun demikian, ABRI akan tetap dengan terbuka menerima kritik-kritik atau saran-saran jang konstruktif dan djudjur; demi kebaikan ABRI sendiri dan demi kebaikan kita bersama.

Saudara-saudara sekalian, Sidang jang mulia;

Demikianlah langkah-langkah pokok jang telah diambil oleh Kabinet Ampera jang akan tetap dipegang teguh dalam membina tertib Politik, mengusahakan pengetrapan demokrasi Pantja-Sila setjara tertib, menurut djiwa dan semangat Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah-masalah politik jang timbul.

Sebagai kesimpulan dan pegangan pokok daripada azas demokrasi Pantja-Sila, ingin kami menekankan bahwa demokrasi Pantja-Sila tetap mendjundjung tinggi hak-hak azasi dan hak-hak demokrasi seseorang warga negara jang penggunaannya harus tetap diabdikan kepada kepentingan jang lebih luas, kepada masjarakat, kepada Rakjat dan Negara. Adalah sangat idial, apabila dalam pengetrapan demokrasi Pantja-Sila itu selalu dapat diperoleh dan diperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, kepentingan golongan dan kepentingan Nasional, kepentingan seluruh Rakjat dan Negara. Tetapi apabila terpaksa timbul suatu masalah, dimana ada pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, antara kepentingan golongan dengan kepentingan Nasional, maka kita harus ichlas dan dengan sukarela dan djiwa besar mengorbankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan jang bersangkutan untuk kepentingan Nasional. Inilah azas dan hukum jang adil daripada demokrasi Pantja-Sila dan inilah pula

menurut pendapat kami resep yang sekiranya paling tepat untuk mentjapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pantja-Sila.

Dalam pada itu kami atas nama Pemerintah sungguh mengharapkan hasil-hasil yang positif dan tepat dalam merumuskan haluan pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan daripada hak-hak azasi dan lain-lain yang prinsipil bagi kehidupan Bangsa dan Negara, yang dewasa ini sedang diusahakan perumusannya oleh Panitia-panitia Ad-hoc MPRS.

Sidang DPR-GR yang kami muliakan;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Setelah kita menelaah demokrasi Pantja-Sila dalam hubungannya dengan pembinaan tertib-politik di Dalam Negeri, marilah kita lanjutkan dengan kebidjaksanaan politik Luar Negeri kita, yang dolandasi oleh Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Landasan kebidjaksanaan politik Luar Negeri kita sungguh tjukup teguh dan kuat seperti yang termaktub dalam Preambul Undang-undang Dasar 1945, yang apabila kita perintji intinja adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Hal ini sekaligus merupakan pengakuan, pernyataan dan penegasan daripada bangsa Indonesia terhadap masalah kemerdekaan didunia ini. Bangsa Indonesia akan menjokong dan mendukung tiap-tiap perdjjuangan kemerdekaan didunia ini, sebab tiap-tiap bangsa berhak untuk memiliki kemerdekaannya, berhak untuk menentukan nasib sendiri, berhak untuk menentukan tjara hidupnya sendiri, berhak untuk memberi isi kepada kemerdekaannya itu sesuai dengan tjita-tjitanja sendiri.

Kedua: Pendjadjahan didunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Sebagai akibat yang logis daripada pandangan dan sikap bangsa terhadap masalah kemerdekaan, maka Bangsa Indonesia menentang tiap-tiap bentuk pendjadjahan, sebab pendjadjahan adalah bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, oleh sebab itulah Bangsa Indonesia menentang kolonialisme dan

imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari manapun datangnya baik yang bersifat politik, ideologis, kultural maupun ekonomis.

Ketiga : Berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Bangsa Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan 'berkehidupan kebangsaan yang bebas' dalam arti kata bahwa bangsa Indonesia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, berhak untuk menetapkan tjaru hidupnya sendiri, tjaru mengatur rumah tangganya sendiri, ini berarti bahwa bangsa Indonesia menolak usaha-usaha tjangpur tangan dan paksaan dari luar, menolak tiap-tiap intervensi dari luar baik terbuka maupun tertutup.

Bangsa Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikapnya terhadap bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Keempat : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan landasan ini, Bangsa Indonesia tidak akan bersikap netral dan pasif, ia akan aktif memperjuangkan tertiptanya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Tidak mungkin ada ketertiban dunia, tanpa kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, sebaliknya tidak mungkin ada satu keadilan sosial di dunia ini tanpa adanya kemerdekaan, ketertiban dunia dan perdamaian.

Kelima : Pantja-Sila yang menjiwai, melandasi dan memberikan haluan kepada Bangsa Indonesia dalam segala segi kehidupannya, jelas menjadi jiwa, landasan dan memberi arah pada politik Luar Negeri kita tetap berpokok pangkal pada ridlo Allah S.W.T., tetap menjunjung tinggi pandji-pandji musjawarah untuk mufakat, untuk mewujudkan keadilan Sosial baik dalam tubuh bangsa sendiri maupun diantara bangsa-bangsa di dunia ini.

Berlandaskan kelima landasan pokok yang tetap itu, tudjuan akhir yang hendak ditjapai oleh Bangsa Indonesia sesuai dengan politik Nasional Bangsa Indonesiasebagai pendedjawantahan tjita-tjita seluruh Bangsa Indonesia, ialah : ‘

Mentjapai masjarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam lingkungan serta suasana persahabatan dan perdamaian Dunia’.

Oleh sebab itu Politik dan Strategi Luar Negeri kita, tudjuan dan haluannja pada satu fihak adalah ‘Mentjapai satu masjarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia’, hakekatnja mengabdikan kepada kepentingan Nasional; pada fihak lain memberikan sumbangan kepada tertjiptanja satu Dunia, jang diliputi oleh suasana dan semangat solidaritas antar bangsa-bangsa, antar umat manusia, persahabatan, persaudaraan dan perdamaian lahir dan bathin.

Sesuai dengan landasan serta dalam rangka mentjapai tudjuan Bangsa Indonesia seperti jang disebutkan diatas, kita melaksanakan hubungan Luar Negeri setjara aktif dengan kemampuan dan peralatan jang ada, berusaha memperbaiki dan memperbaharui hubungan Luar Negeri jang pada rezim Orde-Lama, Indonesia telah banjak ‘ditinggalkan’ oleh kawan-kawan jang sehaluan, karena politik Luar Negeri kita waktu itu tidak realistis dan pragmatis, karena terlalu dititik beratkan pada politik Luar Negeri mertju suar, tanpa memperhatikan kepentingan Rakjat jang mendesak.

Keaktifn kits dalam mengembangkan politik Luar Negeri terlebih-lebih harus dilakukan, karena oleh MPRS telah ditetapkan sebagai program Kabinet Ampera ialah :

- Melaksanakan politik Luar Negeri jang bebas dan aktif untuk kepentingan Nasional;
- Melanjutkan perdjungan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

Maka pelaksanaan politik Luar Negeri Bangsa dan Negara Indonesia, dalam menentukan sikap dan menanggapi masalah-masalah dunia dewasa ini dan jang akan timbul, prinsip-prinsip pokok jang harus dipegang teguh, dan jang harus diperhatikan oleh setiap duta dan petugas luar Negeri kita adalah :

1. Djiwa dan Moral Pantja-Sila jang mendjiwai dan melandasi hubungan internasional kita; politik Luar Negeri kita harus didasarkan pada kekuatan moral, kekuatan budi nurani umat manusia.

2. Politik Luar Negeri jang bebas dan aktif, dalam arti kata bebas menetapkan pandangan dan sikap kita terhadap masalah-masalah internasional, bebas dalam arti lepas daripada ikatan-ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia, jang setjara ideologis bertentangan satu sama lain; Aktif dalam arti aktif dan positif memperdjuangkan terbinanja perdamaian dunia, aktif memperdjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperdjuangkan ketertiban dunia dan aktif ikut serta mentjiptakan keadilan sosial di dunia ini.
3. Politik Luar Negeri jang mengabdikan kepada kepentingan Nasional; adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab Bangsa Indonesia untuk membela dan memperdjuangkan kepentingan nasionalnja, untuk dapat merealisasikan tjita-tjita Bangsa.
4. Politik Luar Negeri jang integratif; dalam arti mengushakan dan menundjang tiap-tiap usaha dan ichtiar jang dapat mempertjapat tertjiptanja satu Dunia jang adil, makmur, dalam suasana persaudaraan, persatuan dan perdamaian.
5. Politik Luar Negeri jang realistis dan pragmatis; realistis dalam arti selalu memperhatikan kenjataan-kenjataan jang ada dalam konstelasi dunia serta penentuan-penentuan kebidjaksanaan sesuai dengan kenjataan-kenjataan itu; pragmatis dalam arti penentuan kebidjaksanaan jang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional kita, dan bagi kepentingan ummat manusia, tanpa meninggalkan aspek-aspek idiil Bangsa Indonesia, moral Pantja-Sila.

Sesuai dan dalam rangka landasan, tudjuan serta prinsip-prinsip pokok daripada hubungan internasional jang disebutkan di atas, maka implemeentasi daripada politik Luar Negeri kita, telah kita laksanakan dan akan terus kita tingkatkan.

Pertama-tama usaha-usaha Pemerintah mengintensifkan hubungan Luar Negeri sesuai dengan prinsip-prinsip pokok tersebut di atas telah menundjukkan hasil-

hasil yang konkrit dan positif dalam hubungannya dengan negara-negara terdekat kita ialah Singapura dan Malaysia.

Konfrontasi terhadap Malaysia, yang jelas tidak membawa keuntungan bagi Rakyat dan hubungan internasional kita, telah dapat dihentikan. Dewasa ini hubungan Indonesia dengan kedua negara tetangga tersebut praktis telah pulih kembali, sekalipun hubungan diplomatik formil, masih memerlukan dipenuhinya beberapa syarat teknis yang dewasa ini dalam taraf persiapan yang saksama oleh kedua belah pihak.

Hubungan Luar Negeri yang sedikit lebih luas tetapi masih dalam lingkungan Asia Tenggara, juga sedang giat kita lakukan ialah 'Kerjasama Regional Asia Tenggara'.

Kerjasama Regional di Asia Tenggara, merupakan usaha yang konkrit kearah pentjiptaan peri-kehidupan yang mantap, aman dan maju dibelahan dunia ini, diberbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, sosial maupun kulturil yang dapat dinikmati bersama oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dalam suasana persamaan derajat, persaudaraan, saling pengertian, saling hormat-menghormati dan saling harga-menghargai.

Politik bertetangga baik dan hidup berdampingan setjara damai, setjara positif hendak kita isi dengan politik bergotong rojong dan kerjasama yang erta dan saling menguntungkan, tanpa syarat-syarat yang dapat merugikan kepentingan nasional kita dan terlepas dari sistem politik yang dianut masing-masing. Dengan demikian bangsa-bangsa Asia Tenggara baik setjara individual maupun setjara kolektif dapat membangun untuk menjapai kemajuan dalam menjiptakan masyarakat adil dan makmur, baik dilingkungan masing-masing maupun dalam lingkungan wilayah Asia Tenggara. Politik ini adalah sesuai dengan tjita-tjita dan Piagam PBB, serta dengan djiwa Dasa Sila Bandung yang menjerminkan solidaritas negara-negara Afrika-Asia, serta prinsip bahwa masalah-masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa-bangsa Asia sendiri dan dengan djalan kerjasama regional.

Disamping itu perkembangan-perkembangan dalam organisasi-organisasi kerdja-sama regional lain, seperti misalnja Pasaran Bersama Eropa, serta pengaruh perkembangan-perkembangan tersebut atas ekonomi kita, memaksakan kita mengadakan pendekatan jang terkoordinir dan tersynchronisir terhadap masalah-masalah dimana kita dan negara-negara tetangga kita ada kepentingan bersama.

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa lambat-laun dan setjara berangsur-angsur kepentingan-kepetingan wilayah Asia Tenggara sebagai keseluruhan dan kepentingan Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara, dapat lebih terjamin.

Dewasa ini usaha-usaha merealisasikan bentuk kerdja-sama Regional Asia Tenggara dilaksanakan setjara intensif; kesepakatan dan persamaan pendapat antara negara-negara pendukungnja ialah Muangthai, Malaysia, Singapura, Pilipina dan Indonesia telah tertjapai. Diharapkan bentuk kerdja-sama ini akan berkembang terus setjara pesat dan bermanfaat bagi kita semua, ummat manusia sedunia.

Kerdja-sama regional ini diharapkan merupakan rintisan djalan, serta dapat mendjadi sumbangan jang riil bagi wilayah-wilayah lain di dunia bahwa 'Ummat manusia adalah satu', merupakan sumbangan dalam memupuk persamaan dan kesamaan dalam mengatasi masalah-masalah jang mengandung perbedaan dan perbedaan pandangan antar bangsa.

Mengenai solidaritas Afro-Asia, tetap akan kita kembangkan berdasarkan persamaan deradjat, saling asih, saling asah dan saling asuh, saling hormat-menghormatisatu sama lain, agar supaja kita dapat bersama-sama berkembang mendjadi bangsa-bangsa dan negara-negara jang madju dan modern.

Solidaritas Afro-Asia menentang adanja usaha-usaha dominasi dari fihak manapin djuga, baik dari luar maupun dari tubuh bangsa-bangsa Afro-Asia sendiri, karena semangat dan usaha dominasi itu bertentangan dengan azas-azas dan prinsip solidaritas bangsa-bangsa Afro-Asia sendiri, jang pernah mengalami kehinaan dibawah dominasi bangsa-bangsa lain. Dalam hubungan ini Persatuan Wartawan Afro-Asia, Organisasi Islam Afria-Asia, dimana Indonesia dapat mengambil peranan jang aktif dapat mendjadi sarana untuk membina solidaritas Afria-Asia ini.

Dewasa ini dilingkungan wilayah Afrika-Asia terdapat masalah-masalah dunia yang akut dan memerlukan tanggapan dan usaha penyelesaian setiap bangsa dan negara yang tjinta damai, ialah masalah Vietnam dan Timur Tengah.

Mengenai masalah Vietnam, Indonesia berpendapat, bahwa persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan oleh Rakyat Vietnam sendiri, kalau perlu dengan bantuan Negara-negara Asia, agar tertjapai penyelesaian setjara damai melalui perundingan. Indonesia tentu bersedia untuk membantu usaha yang menudju kearah tertjapainja penyelesaian setjara damai melalui perundingan, dan bersedia memberikan djasa-djasa baiknja, djika diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam persengketaan itu dan djika faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan berhasilnja prakarsa Indonesia itu, sudah kita anggap ada.

Salah satu faktor yang mutlak harus ada, adalah kesepakatan dan pengertian yang baik dan djudjur dari pihak-pihak yang sekarang ini setjara fisik mengadakan peperangan, untuk benar-benar menghentikan peperangan dan akan menyelesaikan masalahnja melalui perundingan setjara damai.

Menanggapi peristiwa Timur-Tengah, Indonesia dengan prihatin mengikuti dengan seksama perkembangan yang eksplosif di Timur-Tengah itu, yang dapat membahayakan perdamaian dunia. Simpati tetap melekat pada Rakyat dan Negara Indonesia terhadap Rakyat dan Negara-negara Arab yang merupakan sahabat-sahabat dari Rakyat dan Negara Indonesia. Indonesia turut aktif mengusahakan penyelesaian setjara damai, terutama melalui forum PBB.

Berhubung dengan usaha-usaha konsolidasi didalam negeri yang sedang giat kita lakukan disegala bidang, dan untuk tidak mengurangi kemampuan Indonesia sendiri dalam menjembuhkan tubuhnja, yang akan bertentangan dengan tugas Kabinet Ampera yang diberikan oleh Rakyat, maka Indonesia belum berkemampuan untuk memberikan sumbangan yang lebih besar. Namun demikian Indonesia akan membantu setjara aktif prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh PBB untuk mentjari penyelesaian setjara damai terhadap masalah Timur-Tengah itu.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam hubungan dengan masalah Asia, dalam kesempatan ini kami ingin sekedar memberikan ketegasan tentang masalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, yang dewasa ini dan sejak meletusnya G.30-S/PKI, dalam suasana tidak bersahabat. Adalah suatu kenyataan bahwa RRT setjara langsung ataupun tidak langsung membantu G.30-S/PKI dan dalam epilognya selalu melemparkan ketjaman-ketjaman kedji terhadap kita, dan bahkan terdapat bukti-bukti adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya subversif terhadap kekuatan dan Pemerintahan Orde-Baru dewasa ini.

Oleh karena itu sangat dapat dimengerti sikap dan reaksi Rakyat Indonesia (termasuk DPR-GR) yang setjara spontan melakukan aksi-aksi menentang RRT dan menuntut kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap RRT dan memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT.

Pemerintah sangat memperhatikan dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan Rakyat tersebut; hanya tjara penjalurannya serta dalam melaksanakannya, Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memperhitungkan segala soal yang berhubungan dengan untung-ruginya dalam rangka hubungan dan hukum-hukum internasional, dan demi suksesnya tugas pokok Kabinet Ampera.

Sudah djelas, bahwa Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tindakan-tindakan negatif-destruktif dari pihak RRT, baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan Rakyat RRT terhadap wakil-wakil Republik Indonesia di Peking, maupun yang dilakukan oleh agen-agensinya diwilayah Republik Indonesia.

Setiap negara dan kekuatan dari luar yang bersikap bermusuhan dengan negara kita, yang ingin mengusahakan kerusuhan dan mengganggu ketenangan dikalangan Rakyat; yang ingin memaksakan kehendaknya pada negara kita, harus dan wadajib kita tentang dan tanggulangi.

Kepada seluruh masyarakat terutama para pimpinannya yang memang sukar untuk menahan kesabarannya, Pemerintah tetap memintakan penghertian dan mengharapkan supaya segala tindakan itu tetap diperhitungkan; djangan sampai kita djustru dapat masuk perangkap subversinya, sehingga merusak rentjana dan strategi

Pemerintah dalam hal ini, jang akibatnja djustru akan merugikan kepentingan kita, dapat menghambat terselenggaranja tugas pokok Kabinet Ampera.

Saudara Pimpinan dan Anggauta DPR-GR jang terhormat;

Mengenai hubungan antara Indonesia dan Negara-negara Amerika Latin, pun perlu tetap kita pelihara karena mempunjai banjak persamaan, sama-sama merupakan negara-negara jang sedang berkembang, sama-sama berdjoang untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakjatnja, sama-sama pernah melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan.

Oleh sebab itu hubungan Indonesia dan negara-negara Amerika Latin sudah sewadjarnja kita kembangkan, kita arahkan pada usaha bersama untuk saling memberi manfaat, bersama-sama mentjiptakan peri-kehidupan dunia jang damai dan madju.

Saudara-saudara sekalian;

Keinginan Bangsa Indonesia untuk memupuk persahabatan didunia ini atas dasar saling menguntungkan, saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati tanpa mentjampuri urusan rumah tangga masing-masing tetap mendjadi pegangan dalam menjelenggarakan hubungan, baik dengan negara-negara Blok Barat maupun negara-negara Blok Sosialis.

Kemampuan industri dan teknologi dari negara-negara jang telah madju dapat memberikan sumbangan jang berharga bagi kemandjuan dan usaha modernisasi Bangsa Indonesia. Sebaliknja bahan-bahan mentah jang dimiliki oleh Bangsa dan Wilajah Indonesia dapat bermanfaat bagi industri dan kemandjuan negara-negara tersebut.

Indonesia membuka pintu bagi usaha-usaha negara Barat maupun Timur – apabila dimungkinkan – untuk menanamkan modalnja di Indonesia, untuk ikut serta dalam usaha pembangunan di Tanah Air kita, oleh karena kita memang kekurangan modal untuk mengolah kekajaan Indonesia. Untuk ini kita telah mempunjai undang-undangnja. Perlu kita insjafi bersama bahwa modal asing, usaha asing dibumi kita ini sifatnja hanja suplemen belaka; jang pokok adalah pengembangan daripada modal

dan usaha nasional kita sendiri setjara setapak demi setapak, hingga modal dan usaha nasional tetap harus memegang peranan inti dalam pembangunan nasional kita. Khusus kepada kawan-kawan dari Blok Sosialis perlu kami menekankan bahwa Bangsa Indonesia hanja mengenal satu ideologi ialah Pantja-Sila jang kita anggap tepat bagi Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melarang dikembangkannya ideologi komunis dibumi Indonesia, tapi hal ini tidak berarti bahwa Bangsa Indonesia tidak menghendaki hubungan persahabatan dengan negara-negara Sosialis atau negara komunis.

Kita tidak akan mentjampuri urusan rumah tangga negara lain, sebaliknya kita djuga tidak suka adanya tjampur tangan negara lain dalam urusan rumah tangga kita sendiri. Dengan penegasan ini kami mengharapkan agar kekurangan pengertian ataupun kesalah fahaman – apabila ada – dapat dihilangkan setjara wadjar. Dalam kesempatan ini kami ingin pula meminta perhatian kepada negara-negara sahabat dari Blok Sosialis untuk tidak membiarkan adanya oknum-oknum bekas PKI, atau jang anti dengan Orde-Baru di Indonesia sekarang ini, beroperasi diwilajahnja, demi lantjarnja hubungan persahabatan antara kedua negara dan bangsa diatas dasar-dasar jang saja sebutkan diatas.

Saudara-saudara sekalian;

Hubungan internasional dengan Negara-negara non-aligned tetap kita pelihara. Negara-negara non-aligned memiliki peranan penting dalam rangka pembinaan perdamaian dunia. Indonesia jang merupakan salah satu negara non-aligned tetap dan akan meningkatkan kembali hubungan baiknja dengan negara-negara non-aligned ini.

Oleh karena itu kita telah meninggalkan politik ‘poros-porosan’ dari zaman Orde-Lama; jang djelas bertentangan dengan politik luar negeri kita jang bebas dan aktif dan bertentangan dengan kepentingan nasional kita. Indonesia djuga telah berhasil menerobos tabir ketjurgaan dan keragu-raguan jang dizaman Orde-Lama memisahkan Indonesia dari kawan-kawan seperdjuangannya negara-negara Non Blok jang djuga mendjalankan politik bebas dan aktif.

Memang tepatlah politik dan partisipasi kita didalam kelompok negara-negara itu. Disini Indonesia dapat mendjalankan politik bebas aktifnja setjara leluasa dan setjara konstruktif. Sedjarah telah membuktikan bahwa politik bebas dan aktif jang dijalankan oleh negara-negara non-blok itu, walaupun belum sempurna, telah berhasil menimbulkan suatu kekuatan didunia jang bagaimanapun pada taraf terachir tidak dapat diabaikan pengaruhnja. Perkembangan-perkembangan internasional sedjak kulminasi perang dingin, perobahan-perobahan politik di Benua Afrika dan Asia telah membenarkan dan memperkuat kejakinan kita akan prinsif penjelesaian-penjelsaian setjara damai, jang pada dasarnja merupakan pendekatan pokok negara-negara jang menjalankan politik bebas dan aktif.

Dalam rangka menertibkan kembali politik luar negeri kita, maka Indonesia telah pula menduduki kembali kursinja di PBB tanpa mengalami kesulitan. Kita kembali kedalam lingkungan PBB, karena organisasi antar bangsa-bangsa ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kebahagiaan umat manusia. Melalui organisasi internasional ini kitapun berusaha memperdjuangkan kepentingan-kepentingan nasional kita dan mewujudkan aspirasi-aspirasi internasional bangsa kita.

Indonesia menjadari sepenuhnja, bahwa organisasi dunia ini mempunjai kelemahan-kelemahan; jang terutama disebabkan karena adanja dominasi negara-negara besar didalamnja. Walaupun belum sempurna, namun PBB masih tetap merupakan forum jang terbaik untuk menjelesaikan masalah-masalah internasional setjara bersama-sama. Kita berusaha memperbaiki organisasi ini dari dalam; bukan menghantjurkannja dari luar.

Oleh karena itu, kita berusaha sungguh-sungguh untuk ikut aktif mengembangkan potensi kelompok negara-negara jang berpolitik luar negeri bebas dan aktif dalam PBB.

Indonesia sungguh-sungguh mengharapakan dan berusaha agar organisasi dunia ini benar-benar efektif dan berwibawa; bukan karena dukungan atau paksaan

negara-negara besar; melainkan karena putusan-putusannya benar-benar dirasakan adil dan dihasilkan dari mufakat musjawarah.

Pimpinan dan para Anggota DPR-GR jang terhormat;

Kami sekarang akan menjelaskan kebijaksanaan pembinaan tertib ekonomi. Masalah ekonomi ini memang merupakan masalah terberat jang kita hadapi. Lebih-lebih lagi karena kemunduran-kemunduran ekonomi itu mempunjai akar-akar jang dalam dan berdjalan bertahun-tahun. Oleh karena itu kami sekali lagi minta benar-benar pengertian dari Rakjat, sebab keadaan perekonomian kita ini tidak mungkin akan mendadak menjadi baik; atau dengan kata-kata jang sederhana harga-harga mendadak mendjadi turun, dan produksi mendjadi segera berlimpah-limpah.

Kepada Rakjat banjak, kami ingin sekali lagi mengingatkan bahwa keadaan perekonomian kita jang diwariskan oleh keadaan jang lampau, adalah sangat buruk dan menjedihkan, sehingga hampir-hampir sadja tida adakemampuan lagi bagi Rakjat dan Negara untuk melakukan perbaikan, apabila tida disertai dengan tekad jang bulat berdasarkan rasa kepertjajaan jang teguh kuat akan kemampuan Bangsa dan Negara serta kejakinan akan adanja ridlo dari Tuhan Jang Maha Esa. Tidak perlulah kami beberkan lagi kenjataan kebobrokan warisan itu, karena telah kita ketahui semua dan telah merupakan kenjataan sedjarah. Jang penting dan mendjadid masalah sekarang adalah bagaimana usaha-usaha memperbaikinja.

Saudara-saudara sekaian;

Apabila Bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, makapernjataan itu bukanlah sekedar untuk melepaskan diri dari geganggaman pendjadjahan – meskipun inilah hal jang sangat penting dan fundamental -, akan tetapi adalah pula merupakan tekad dan keinginan seluruh rakjat untuk dengan tegaknya kemerdekaan Negara itu dapat membina masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil jang diridloi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Memang tudjuan terachir akan kita tjapai adalah keadilan sosia; jaitu masjarakat adil dan mamur berdasarkan Pantja-Sila. Masjarakat dengan kekajaan jang berlimpah-limpah, dimana tiap warganegara dapat mengenjam kebahaiaan lahir dan

bathin. Masyarakat yang kita tuju adalah masyarakat yang maju dan modern dengan demokrasi ekonomi, artinya kemakmuran yang meningkat dan merata tanpa penindasan.

Perekonomian kita akan kita susun dengan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Hal ini tidak berarti, bahwa kita boleh berbuat sesuka hati kita, tidak berarti kita boleh begitu saja menggunakan milik negara, tidak berarti kita boleh bermalas-malasan menanti 'hadiah' dari negara atau dari orang lain.

Demokrasi ekonomi, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila dejustru harus ditjapai dengan bekerja keras, berentjana dan rasionil.

Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara penggunaannya ditentukan dan diawasi oleh Rakyat melalui Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat.

Setiap warganegara harus ikut serta aktif mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu; dan agar ada kegairahan bekerja, setiap warganegara diberi kebebasan memilih lapangan bekerja yang sesuai dengan keinginan dan bakatnya; sedangkan negara wajib mengusahakan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warga-negaranya.

Hak milik perseorangan diakui dan harus dimanfaatkan guna kesedjahteraan Rakyat banyak, dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan alat untuk menindas atau menghisap sesama manusia.

Potensi, inisiatif dan daya tjipta harus terus berkembang sepenuhnya demi kepentingan umum. Warganegara yang tidak mampu bekerja, fakir-miskin, anak-anak terlantar dan sebagainya memperoleh jaminan sosial dari Negara.

Dalam demokrasi ekonomi, dengan demikian Negara mengatur dan memberi arah kepada pertumbuhan ekonomi yang memberikan kebahagiaan kepada seluruh warganegara; sebab negara tidak akan mampu mengatur, apalagi melaksanakan sendiri segala-galanya sampai soal-soal yang ketjil.

Oleh karena itu negara dan aparaturnya tidak boleh mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. Segala

bentuk monopoli, baik oleh negara maupun oleh swasta, yang merugikan kepentingan masyarakat dilarang.

Monopoli hanya diadakan untuk menjamin kepentingan Rakyat banyak.

Demokrasi ekonomi melarang sistem 'persaingan bebas liberalisme' yang menumbuhkan penindasan dan penghisapan terhadap manusia atau bangsa lain. Akan tetapi kompetisi positif dan konstruktif untuk meninggikan mutu barang dan jasa tetap diperlukan.

Demikianlah kerangka demokrasi ekonomi yang akan kita capai sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No. XXIII tahun 1966.

Telah 22 tahun kita merdeka. Sampai seberapa jauh cita-cita ini telah tercapai? Dimanakah kita sekarang berada dan apakah prospek-prospek atau harapan-harapan dimasa depan ?

Pada ulang tahun kemerdekaan yang kedua puluh dua ini kita masih bergulat dengan kemerosotan ekonomi yang kita warisi dari rezim Orde-Lama. Inflasi yang kita warisi telah merusak segala sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa kita. Ia telah pula menimbulkan pembagian pendapatan yang tidak adil, dan hampir menghilangkan kesempatan akan pekerjaan ataupun penghidupan yang layak bagi Rakyat kita.

Sedjalan dengan inflasi ini, maka kemakmuran Rakyat kita semakin merosot. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun akhir-akhir ini terlalu rendah, bahkan tidak sepadan dengan ketjepatan bertambahnja penduduk bangsa kita. Ia telah pula menimbulkan pembagian pendapatan yang tidak adil, dan hampir menghilangkan kesempatan akan pekerjaan ataupun penghidupan yang layak bagi Rakyat kita.

Sedjalan dengan inflasi ini, maka kemakmuran Rakyat kita semakin merosot. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun akhir-akhir ini terlalu rendah, bahkan tidak sepadan dengan ketjepatan bertambahnja penduduk bangsa kita. Akibatnja adalah, bahwa pendapatan nasional per-djiwa penduduk semakin ketjil dan kemakmuran Rakyat kita semakin mundur.

Dibandingkan dengan lain-lain negara didunia, maka ekonomi Indonesia jauh ketinggalan; cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, masih jauh dari

kenyataan. Disamping itu, juga terdapat pengaturan kehidupan ekonomi telah diselewengkan dari landasan demokrasi ekonomi oleh rezim Orde-Lama.

Ekonomi Indonesia diatur tanpa menghiraukan pengawasan efektif dari Dewan Perwakilan Rakyat (melalui budget dan perundang-undangan; sedangkan hukum-hukum ekonomi tidak diperhatikan. Tjampur tangan Pemerintah dalam kehidupan ekonomi terlalu luas dan mendalam sehingga melumpuhkan daya kreasi swasta dan inisiatif masyarakat.

Oleh MPRS penjiwaan ini telah dikoreksi, dan kepada Pemerintah telah ditugaskan untuk kembali kepada pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen. Khusus untuk mengatasi kemerosotan ekonomi itu, maka kepada Kabinet Ampera ditugaskan untuk mengusahakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXIII telah ditugaskan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dalam jangka pendek untuk menjapai sasaran-sasaran pengendalian inflasi, pentjukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pentjukupan kebutuhan sandang.

Sedangkan untuk jangka panjang maka skala prioritas adalah pembangunan bidang pertanian, bidang prasarana dan bidang industri pertambangan dan minyak.

Berlandaskan pada Ketetapan MPRS inilah, oleh Pemerintah sedjak Oktober 1966 telah diambil tindakan-tindakan stabilisasi ekonomi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah rangkaian kebidjaksanaan ekonomi yang dikenal dengan 'Peraturan 3 Oktober', gelombang kedua adalah tindakan-tindakan ekonomi yang dikenal dengan 'Peraturan 10 Pebruari 1967' dan gelombang ketiga adalah 'Peraturan 28 Djuli 1967'. Tindakan-tindakan ekonomi yang bergelombang ini bertudjuan untuk mengendalikan laju-inflasi disatu pihak, dan dilain pihak meng-ichtiarkan rehabilitasi ekonomi agar tertjiptalah landasan yang kokoh bagi persiapan pembangunan ekonomi yang Insja Allah apabila disetudjui oleh DPR-GR atau disjahkan oleh MPRS direntjanakan akan dimulai setjara berentjana mulai tahun 1969 yang akan datang, dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Tindakan ekonomi yang tertajakup dalam ‘Peraturan 3 Oktober’ memuat pokok-pokok usaha :

- (a) kebidjaksanaan anggaran belandja yang seimbang, untuk meniadakan salah satu sebab dari pada inflasi jaitu defisit dalam anggaran belandja. Pengarahan yang lebih tepat dari pada pengeluaran, diharapkan lebih memperlantjar arus barang dan produksi, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara lebih mengutamakan pembebanan setjara lebih adil dari pada pembiajaan usaha ekonomi;
- (b) kebidjaksanaan perdagangan luar negeri lebih memberikan keleluasaan ruang gerak bagi eksportir, sedangkan melalui sistim Bonus Ekspor, alokasi devisa ingin lebih tersalurkan kesasaran produksi;
- (c) kebidjaksanaan kredit setjara selektif dan lebih terarah pada usaha-usaha produktif, chususnja dibidang pangan, ekspor, prasarana dan industri;
- (d) kebidjaksanaan penjelesaian dan penundaan pembayaran hutang-hutang luar negeri dengan maksud untuk mengurangi beban pembayaran dalam neratja pembayaran, sehingga memberi ruang yang lebih luas dalam penggunaan devisa kita yang sudah terbatas ini;
- (e) kebidjaksanaan mengundang penanaman modal asing, dimaksudkan untuk membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka kekajaan alam tanah air kita, membuka kesempatan kerdja serta membantu usaha peningkatan pendapatan nasional, oleh karena kemampuan Nasional sendiri hampir tidak ada;
- (f) kebidjaksanaan de-kontrol dan de-birokratisasi, dimaksudkan untuk mengembangkan daja kreasi dan inisiatif masjarakat untuk turut serta berusaha dalam pembangunan ekonomi negara kita.

Pada tanggal 10 Pebruari telah diambil serangkaian tindakan dibidang penjesuaian harga dan tarif, dengan maksud untuk menghilangkan berbagai

kepentingan dalam perbandingan harga, dan memberi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi keperluannya dengan sumber pembiayaannya sendiri.

Lagi pula diharapkan agar dengan jalan demikian, efisiensi didalam perusahaan dapat lebih ditingkatkan, sedangkan beban yang tadinya dipikulkan pada Rakyat bukan konsumen-djasa-djasa, kini dapat dikembalikan pada konsumen-konsumen yang menikmati jasa-djasa dari perusahaan-perusahaan itu.

Rangkaian tindakan-tindakan ekonomi ini jelas mempengaruhi perkembangan ekonomi kita. Sasaran Pemerintah untuk menundukkan inflasi akhir-akhir ini menunjukkan hasil-hasil yang tidak ketjil.

Laju inflasi yang selama ini bergerak antara 10 hingga 50% sebulan, akhirnya dapat ditundukkan menjadi kurang dari 5% sebulan. Dan bahkan sejak bulan Maret 1967 yang lalu terbukti bahwa laju inflasi berada dibawah 3% sebulan.

Sejak semula Pemerintah dalam merentjanakan tindakan-tindakan stabilisasi ini merasa perlu untuk melakukannya dengan setjara bertahap.

Tindakan stabilisasi ekonomi telah berdjalan +10 bulan dan sekarang telah meningkat ketahap konsolidasi; maka Pemerintah merasa perlu untuk lebih menjempurnakan atau mengkonsolidasikan tindakan-tindakan yang telah dirintis sejak 3 Oktober 1966 yang lalu itu.

Arah penjempurnaan terutama diletakkan pada kelantjaran arus barang, agar dapat memberikan pengaruh positif pada usaha pengendalian inflasi, sambil memulihkan aparat-aparat produksi.

Dalam usaha melantjarkan arus barang ini, Pemerintah sadar bahwa persediaan devisa merupakan faktor yang paling membatasi kelantjaran ini.

Baik untuk impor barang jadi, maupun untuk impor bahan baku, alat-alat onderdil (spareparts) dan peralatan modal produksi dalam negeri diperlukan devisa.

Maka usaha yang mutlak harus dilakukan adalah untuk lebih memperbesar persediaan devisa ini, dan dilain pihak mengarahkan penggunaannya untuk keperluan produksi dalam negeri.

Dalam hubungan inilah diambil rangkaian tindakan-tindakan untuk memperbesar persediaan devisa yang berupa:

- a) penjempurnaan pemberian Bonus Ekspor, sehingga lebih merangsang ekspor;
- b) perubahan daftar golongan barang-barang ekspor yang lebih realistis untuk lebih meningkatkan kegiatan ekspor;
- c) penjederhanaan prosedur ekspor dan impor;
- d) dan lain-lain.

Untuk lebih mengarahkan penggunaan devisa bagi produksi dalam negeri, telah pula diambil tindakan-tindakan antara lain:

- a) penyesuaian barang-barang yang boleh diimpor baik melalui Bonus Ekspor ataupun Bonus Ekspor tanpa cover;
- b) penyesuaian penilaian tarif bea masuk;

yang kesemuanya setjara terperintji telah diuraikan dan dilaporkan oleh Pemerintah (Menteri Utama EKKU) kepada Sidang DPR-GR.

Usaha-usaha ini, bersamaan dengan tindakan menurunkan pajak penjualan serta proteksi, diharapkan dapat menggairahkan produksi dalam negeri tanpa mengganggu usaha untuk mengendalikan laju inflasi.

Lebih penting dari pada materi dari peraturan-peraturan tersebut, adalah semangat yang mendukung kebidjaksanaan ini.

Kebidjaksanaan ini bertolak dari pendirian memberi kepertjajaan dan kebebasan yang lebih wajar kepada pengusaha Indonesia, dan mengadajknja setjara aktif dalam usaha mengendalikan inflasi dan pembangunan ekonomi, sesuai dengan landasan idiil demokrasi ekonomi.

Pemerintah mengharapkan agar pemberian kebebasan yang lebih luas kepada pengusaha kita, dapat digunakan dengan penuh tanggung-djawab demi kepentingan Rakyat kita seluruhnja. Adalah pula mendjadi harapan Pemerintah agar dengan adanja suasana keleluasaan dan kepertjajaan ini iklim ekonomi akan lebih sehat dan kegiatan ekonomi akan dapat mendjadi lebih hidup dan menggairahkan.

Dalam tindakan 28 Djuli 1967 ini, Pemerintah telah “rela” menjerahkan sebagian dari pada penerimaan padjak ekspor, padjak pendjualan, dan lain-lain dengan harapan adanja penerimaan jang lebih besar dan realistis bagi pengusaha dan Daerah, dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi, sehingga setjara keseluruhan membawa kemadjuan pada ekonomi Indonesia.

Garis kebidaksanaan ini tentulah akan lebih berhasil, apabila Pemerintah Daerah djuga menghajati semangat ini dan turut mentjiptakan iklim ekonomi jang sehat, memeberi kepertjajaan dan kebebasan jang lebih wadjar kepada pengusaha-pengusaha, dan berusaha mengurangi faktor-faktor jang menghambat kelantjaran arus barang. Dalam hal ini hasil-hasil Musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 26 sampai dengan 28 Djuli jang lalu dapat didjadikan pedoman dalam usaha peningkatan kegiatan ekonomi Negara kita.

Sekaligus dengan adanja garis kebidaksanaan ini, diharapkan dapat pula membantu usaha Pemerintah untuk menghapuskan kegiatan penjelundupan-penjelundupan, dengan menjalurrkannya kearah usaha ekonomi jang menjeluruh setjara sah dan wadjar.

Sedjak Pemerintah melaksanakan tugas jang dipertjajakan oleh MPRS kepadanya, maka usaha-usahanja senantiasa diarahkan sesuai dengan skala-prioritas jang telah ditentukan oleh MPRS. Khusus dalam usaha mengendalikan inflasi, hasil jang ditjapai Pemerintah djika dibandingkan dengan perkembangan inflasi ditahun 1966, mentjatat angka-angka statistik sebagai berikut:

KENAIKAN INDEKS NIAJA HIDUP (Djakarta)
(dalam persentase)

Bulan	1966	1967	Bulan	1966	1967
Djanuari	54%	10%	April	9%	0,65%
Pebruari	20%	20%	Mei	7%	0,19%
Maret	30%	3,7%	Djuni	34%	3,19%

Djuli

9%

2%

Dari angka statistik ini djelaslah bahwa tingkat kenaikan harga menundjukkan persentase jang lebih rendah dibandingkan dengan tahun jang lampau. Pemerintah akan berusha keras agar supaja dibulan-bulan jang akan datang tingkat kenaikan harga ini dapat lebih diredakan.

Dalam usaha pertjukupan kebutuhan pangan, Pemerintah memberikan perhatian sepenuhnja kepada peningkatan produksi pangan. Rentjana peningkatan produksi bera melalui Bimbingan Masal (BIMAS) terus diselenggarakan. Dalam hubungan ini penjediaan pupuk, bahan obat-obatan (insektisida), perbaikan saluran irigasi, diharapkan lebih menguntungkan dan meningkatkan produksi pangan setjara pesat.

Disamping itu, Pemerintah djuga terus mentjari ichtiar-ichtiar agar kepada masjarakat kita dapat disediakan bahan pangan pengganti beras, jang kadar dan rasanja tidak kalah dengan beras. Penelitian dan pentjobaan untuk memproduksi bahan pengganti beras jang serupa dengan beras dan tidak kalah mutunja, tengah giat dilakukan. Mudah-mudahan hasil pertjobaan ini dalam waktu jang singkat dapat diperkenalkan pada masjarakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah, karena kebutuhan kita akan beras adalah sangat besar dan terus meningkat, sedangkan produksi beras kita, meskipun dapat ditingkatkan, belum dapat mengedjar peningkatan kebutuhan.

Disamping masalah beras, maka sembilan bahan pokok senantiasa mendapat perhatian jang khusus dari Pemerintah. Dengan memadukan kebidjaksanaan impor, produksi dalam negeri, distribusi dan pemasaran didaerah-daerah dari beberapa bahan-bahan kebutuhan pokok, Pemerintah mengharapkan dapatnja bahan-bahan kebutuhan ini tersediakan tepat pada waktunja.

Dalam kegiatan rehabilitasi prasarana ekonomi, titik berat diletakkan kepada perbaikan djalan-djalan, peningkatan kapasitas angkutan kereta-api, pengerukan sungai dan dasar pelabuhan, serta perbaikan alat-alat telekomunikasi. Oleh karena keperluan untuk rehabilitasi dibidang ini sangatlah besar, terutama akibat terlantarnja

prasarana ekonomi selama bertahun-tahun, maka mungkin masih dirasakan, bahwa perbaikan yang telah dilakukan dalam bidang ini masih sangat ketjil dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Sungguhpun demikian, dengan segala daya dan tenaga, dan dengan mengikutsertakan Civic Mission dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemerintah akan berusaha mengedjar ketertinggalannya dalam rehabilitasi prasarana yang diabaikan oleh rezim Orde-Lama selama ini.

Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan ekspor, Pemerintah menjatakan bahwa hasil ekspor yang ditjapai dalam semester pertama (6 bulan) telah menjapai 58% dari target ekspor yang ditetapkan; maka dengan penuh optimeisme diharapkan target ekspor tahun 1967 dapat ditjapai. Sementara itu, Pemerintah tidak menutup mata pada kesukaran-kesukaran yang akan dihadapi pada bulan mendatang ini.

Kenaikan tarif untuk beberapa bahan ekspor kita ke Negara-negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa, kejadian-kejadian di Timur Tengah yang menimbulkan gangguan akan kelantjaran arus barang berhubung ditutupnya terusan Suez, dan lain-lain, merupakan hal-hal yang perlu kita perhitungkan dalam usaha peningkatan kegiatan ekspor.

Oleh karena itulah kita harus tetap berusaha dapatnja meningkatkan efisiensi usaha ekspor kita, lebih meningkatkan kualitas bahan-bahan ekspor kita, agar kepertjajaan Dunia Internasional terhadap produk-produk, yang berasal dari Negara kita, tetap terpelihara, bahkan lebih meningkat; dalam hubungan ini Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih khusus untuk menertibkan penentuan kualitas serta lain-lain usaha untuk meningkatkan kepertjajaan Dunia Internasional tersebut.

Dalam usaha menjukupi kebutuhan sandang, Pemerintah telah berusaha untuk menjediakan djumlah sandang sebesar ± 5 meter bagi setiap djiwa, untuk tahun ini.

Dalam masa-masa meningkatnja permintaan akan barang tekstil, berhubung dengan hari-hari raya, maka Pemerintah merasa perlu untuk mengimpor tekstil. Akan tetapi untuk selanjutnja, Pemerintah ingin mengembalikan penjediaan tekstil pada kemampuan produksi dalam negeri.

Pemerintah mengharapkan agar mulai sekarang sudah dapat disusun rentjana oleh sektor industri tekstil untuk menampung permintaan kebutuhan tekstil bagi Rakyat, baik untuk memenuhi kebutuhan biasa, maupun untuk hari-hari raya.

Apabila dalam semester-pertama industri dalam negeri perlu mengadakan penyesuaian berhubung dengan tindakan-tindakan stabilisasi ekonomi, maka untuk waktu-waktu mendatang ini, chusunja berkat masuknja bahan-bahan, alat onderdil dan peralatan modal jang lebih banjak dari mluar negeri, serta kebidjaksanaan 'proteksi', Pemerintah mengharap agar industri-industri jang sehat dapat memulihkan kapasitas produksinja kembali. Dengan demikian, kegiatan produksi ini akan dapat menampung tenaga kerdja lebih banjak dan produktivitas dapat ditingkatkan, jang kesemuanja itu berarti sumbangan jang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita.

Dalam hubungan ini kami serukan, agar kita semuanja – djuga aparatur Pemerintahan – mau menghargai dan menggunakan barang-barang jang telah dapat dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita sendiri. Sebaliknja, para produsen kita hendaknja terus berusaha meningkatkan efisiensi kerdja dan meningkatkan mutu produksinja.

Garis kebidjaksanaan Pemerintah untuk waktu mendatang adalah tetap melandjutkan usaha sesuai dengan skala-prioritas djangka pendek jang ditetapkan oleh MPRS. Dalam rangka usaha ini, Pemerintah merentjanakan untuk mentjapai ladju inflasi pada tingkat jang serendah-rendahnja ditahun 1968; sehingga terdapatlah landasan jang sehat dan kuat bagi rentjana dan usaha pembangunan jang diharapkan akan dimulai pada tahun 1969.

Seperti jang telah kami kemukakan pada permulaan uraian ini, Pemerintah belum berkesempatan menjampaiakan RUU APBN 1968 pada hari jang ditetapkan oleh DPR-GR, jaitu pada hari ini.

Meskipun demikian, pada kesempatan ini Pemerintah ingin menjampaiakan beberapa pokok-pokok fikiran jang akan didjadikan pegangan oleh Pemerintah dalam menjusun Anggaran tersebut. Mengingat bahwa pengendalian-inflasi masih merupakan tugas-utama, djuga untuk tahun 1968, maka Pemerintah bermaksud untuk

tetap berpegang pada prinsip Anggaran Berimbang untuk tahun 1968 ini. Stabilisasi Ekonomi tidak mungkin tertjapai apabila inflasi masih belum dapat dikendalikan.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam rangka Anggaran-Berimbang ini, Pemerintah bermaksud untuk lebih mengintensifkan dan meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri. Didalam rangka ini; chususnja padjak-langsung diharapkan akan memegang peranan penting, dengan dilaksanakannya sistim “Menghitung Padjak Sendiri” (MPS) dan “Menghitung Padjak Orang” (MPO), jang merupakan inti daripada sisitim “self-assortment”.

Kebidjaksanaan “memberikan kepertjajaan” sepenuhnja kepada para wadajib padjak untuk menentukan sendiri djumlah padjak, jang diperkirakan wadajib dibajarkan kepada Negara, adalah sesuai dengan garis kebidjaksanaan Pemerintah untuk lebih mendasarkan tindakannya pada unsur-unsur kepertjajaan, kebebasan dan tanggung-djawab pada kita semua. Pemerintah mempertjajakan penentuan padjak ini pada anggota masyarakat sendiri, dengan kejakinan bahwa rasa tanggung-djawab masing-masing akan tjukup besar, sehingga penggunaan kebebasan ini, sesuai dengan hati nurani kita masing-masing tidak akan merugikan Negara dan Rakyat.

Fungsi padjak akan lebih diarahkan sebagai alat pembimbing kegiatan ekonomi, sehingga Pemerintah dalam menentukan matjam-matjam padjak dan tarif padjak, akan melakukannya dalam rangka membangkitkan kegiatan ekonomi dalam negeri.

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah diharapkan akan terselesaikan segera. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara di Pusat dengan di Daerah akan dapat ditjapai sebaik-baiknya.

Mengingat faktor-faktor objektif, maka menurut perkiraan untuk tahun 1968 ini penerimaan Negara untuk sebagian masih akan diperoleh dari bantuan-bantuan Negara-negara sahabat.

Dibidang pengeluaran, Pemerintah bermaksud untuk sedjauh mungkin membiayai pengeluaran routine dengan penerimaan dalam negeri. Dalam hubungan

ini usaha penjederhanaan, efisiensi dan penghematan akan terus dijalankan. Sedjalan dengan ichtiar ini, maka perbaikan nasib pegawai negeri akan diusahakan sesuai dengan kemampuan Pemerintah.

Untuk usaha-usaha pembangunan akan diberikan ruang gerak jang lebih luas dalam anggaran pengeluaran. Sesuai dengan skala prioritas nasional, maka anggaran-pembangunan akan lebih mengutamakan bidang pertanian, prasarana-ekonomi, ekspor dan industri sandang; berikut industri jang menundjang kegiatan-kegiatan dibidang pertanian.

Dalam rangka ini diharapkan dapat diikuti-sertakan usaha swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri; dengan demikian, anggaran pembangunan Pemerintah dapatlah diarahkan pada sektor-sektor strategis sehingga perkembangan ekonomi dapat dibimbing sesuai dengan garis kebidjaksanaan Pemerintah.

Sidang DPR-GR jang terhormat;

Chusus mengenai pengeluarn-pengeluaran dalam valuta asing, Pemerintah akan mengambil ketentuan-ketentuan jang lebih ketat lagi, sehingga dapat diharapkan dalam tahun 1968 dapat dilakukan penghematan jang lebih keras daripada tahun 1967.

Mengenai kemungkinan adanja kelebihan tenaga kerdja dalam bidang Pemerintahan, akan diusahakan mengalihkannja kesektor-sektor produksi jang dibiajari dari penanaman modal asing maupun modal domestik.

Sedjalan dengan persiapan RUU APBN ini, Pemerintah memberikan pula perhatian chusus pada Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Pemerintah telah menugaskan kepada Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional jang telah disempurnakan organisasinja untuk bersama-sama dengan Departemenn-departemen jang bersangkutan melakukan penjusunan rentjana pembangunan untuk djangka waktu 5 tahun, jang disesuaikan dengan kondisi dewasa ini dan kebutuhan jang urgen dan mendesak dari Rakjat banjak.

Diharapkan rentjana pembangunan tersebut dapat diselesaikan setjara konstitusionil dalam tahun 1968, sehingga dapat segera dimulai pelaksanaannya pada 1 Djanuari 1969, seperti yang telah disebutkan diatas.

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Lembaga-lembaga konstitusionil yang berwenang, serta sambil menunggu bahan-bahan pertimbangan dari masyarakat luas yang memang sangat diharapkan, maka pokok-pokok gagasan kami dalam menjusun perentjanaaan pembangunan 5 tahun itu, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Sasaran-sasaran yang hendak ditjapai pada akhir tahapan pembangunan lima tahun pertama adalah:

1. Penjediaan pangan yang meningkat sehingga dapat tertjapai kondisi murah pangan dan dapat terbeli oleh rakyat banyak;
2. Penjediaan sandang yang meningkat baik yang dihasilkan oleh industri sandang sendiri maupun yang masih perlu diimpor, murah dan dapat terbeli oleh rakyat banyak;
3. Penjediaan perumahan rakyat, meskipun masih terbatas sifatnya tapi sudah dapat dinikmati oleh Rakyat;
4. Peningkatan lapangan kerja baik di desa-desa maupun di kota-kota;
5. Transport umum yang terjangkau dan murah;
6. Peningkatan usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan agama sehingga hidup budaya dalam arti yang luas serta kehidupan kerohanian menjadi kebutuhan insan dan masyarakat dapat dinikmati oleh Rakyat.

Setjara umum, maka sasaran akhir tahap pembangunan 5 tahun yang pertama itu adalah “tertjapainya suatu keadaan murah sandang, pangan dan kebutuhan hidup dalam suasana keadaan masyarakat yang aman tenteram dan tertib dinamis”.

Sasaran-sasaran tersebut diatas akan kita tjapai dengan sebuah konsepsi pembangunan berentjana dan menjeluruh, baik meliputi bidang-bidang materiil

maupun spirituil dan disebarakan keseluruh wilayah tanah air ini sesuai dengan kondisi alamiah dan faktor-faktor ekonomi jang memungkinkan.

Dibidang pembangunan materiil, berdasarkan kemampuan kita dewasa ini dan perkiraan kondisi jang akan datang, maka program pembangunan itu masih harus dititik-beratkan pada bidang-bidang pertanian-agraria (seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan pertambangan. Program ini harus diusahakan dapatnja dirangkaikan pula dengan program transmigrasi, karena usaha transmigrasi ini merupakan kebutuhan jang mendesak pula bagi perkembangan dan kemajuan Bangsa, sedangkan pembangunan-pembangunan dibidang pertanian-agraria dan pertambangan itu jang pada umumnya memerlukan banjak tenaga kerdja akan memungkinkan pemindahan penduduk dalam djumlah-djumlah jang agak besar.

Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pertambangna jang dikaitkan dengan transmigrasi harus dilakukan serentak dengan penambahan/pembangunan infra-struktur dan alat perhubungan.

Disamping dan untuk menundjang pembangunan dibidang pertanian-agraria itu, maka pembangunan industri ringan (ketjil) dan sednag jang dapat menghasilkan kebutuhan materiil bagi Rakjat dan djuga menghasilkan alat-alat pertanian jang dapat memperlantjar/meningkatkan produksi pertanian, seperti pabrik pupuk, alat-alat up-grading hasil pertanian, angkutan dan sebagainya sungguh diperlukan.

Oleh karena modal kita masih sangat terbatas, maka rentjana pembangunan itu memerlukan bantuan modal dalam bentuk investasi modal asing; jang dilakukan tanpa meninggalkan basis ideologi dan prinsip-prinsip kita. Demikian pula karena keterbatasan kita akan modal, maka pembangunan industri berat belum mungkin diadakan dalam pembangunan 5 tahun pertama ini.

Program pembangunan jang akan datang itu antara lain akan meliputi:

- a. Intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan eksploitasi hutan;
- b. Pembangunan industri agraria;
- c. Pembangunan industri ringan;

- d. Pembangunan industri sednag; jang dapat mendukung keperluan tersebut pada a, b dan c;
- e. Pembangunan prasarana dan perhubungan.

Dalam pada itu dalam masa 3-5 tahun pembangunan itu harus sduah dilakukan perentjanaan dan persiapan industri berat untuk tahap pembangunan selandjutnja.

Disamping pembangunan materiil tersebut diatas, maka perlu pula pembangunan spirituil. Dalam bidang ini, maka dalam djangka waktu 3-5 tahun jang akan datang harus sudah mulai terasa adanja kemadjuan dan keleluasaan pengembangan djiwa dan bakat rakjat, suatu kemadjuan mental dan technis jang diperlukan untuk memulai tahap-tahap selandjutnja menudju pada sasaran achir masjarakat adil dan makmur.

Untuk itu maka pertama-tama diperlukan perluasan dan penjempurnaan fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak sampai pendidikan tinggi; dengan mengutamakan pendidikan kedjuruan jang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini tidak boleh dilupakan pengembangan dan pembangunan projek-projek riset, baik projek riset jang ilmiah sifatnja maupun riset-riset praktis, jang diperlukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru guna kemadjuan peningkatan produksi jang tjepat dan kemadjuan perkembangan kebudajaan Bangsa pada umumnja.

Pembangunan bidang-bidang keagamaan, kesehatan, keolahragaan, kesenian dan kebudajaan perlu pula mendapatkan perhatian dan dilakukan sedjalan dan serasi dengan pembangunan materiil.

Dengan terselenggaranja pembangunan dalam bidang spirituil jang tjepat, diharapkan Bangsa Indonesia akan mendjadi Bangsa jang sehat dan kuat, bermental berani dan kreatif, bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa dan siap menghadapi tugas-tugas pembangunan selandjutnja jang akan terus meningkat dan lebih berat.

Dilihat dari sumber pembiajaannya, maka basis daripada realisasi pembangunan terletak pada dua bidang, yakni Agraria dan Pertambangan, karena kedua bidang itu merupakan sumber penghasil devisa negara; sedangkan devisa itu kita perlukan bagi usaha pembangunan dibidang-bidang jang lain.

Dilihat dari aspek operasionilnja, maka diperlukan adanya prasarana fisik dan prasarana mental. Prasarana fisik adalah keharusan tjukupnja dan lantjarnja fasilitas-fasilitas infra-struktur dan telekomunikasi jang merata diseluruh tanah air, terutama jang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pelabuhan-pelabuhan. Prasarana mental adalah kemauan keras dan ketekunan kita untuk membangun.

Aspek idiil dari pembangunan ini adalah, agar kesatuan Indonesia baik dalam arti fisik maupun mental dapat terus-menerus dipupuk dan diperkuat.

Walaupun sasaran achir rentjana pembangunan 5 tahun jang pertama ini seperti jang dikemukakan diatas nampaknja sederhana, akan tetapi dibalik itu diperlukan kegiatan-kegiatan jang sangat luas dan besar. Baik untuk perluasan dan intensifikasi pertanian, baik untuk perbaikan-perbaikan prasarana, baik untuk membuka daerah-daerah perindustrian ringan dan sebagainya itu, diperlukan penjebaran penduduk (tenaga kerdja) serta perentjanaaan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengerahan dana dan kemampuan jang baik dan tepat.

Sekali lagi saja kemukakan, bahwa gagasan-gagasan ini adalah gagasan-gagasan pokok jang sementara sifatnja, jang dalam penjusunannja nanti setjara terperintji masih harus diudji setjara wadjar, objektif dan realistik.

Untuk dapat menjusun rentjana jang tepat, sungguh diperlukan dan diperhatikan banjak hal dan faktor; dibutuhkan adanya data-data jang tjukup, perkiraan jang tepat atas kondisi-kondisi jang ada, kemampuan pembiajaan dan managerment dan sebagainya.

Tetapi apapun dan bagaimanapun tjorak pola perentjanaan tersebut, harus tetap dalam pola dasar kepribadian Bangsa, harus tetap dilandasi oleh djiwa dan semangat Pantja-Sila, harus merupakan langkah madju kearah tertjapainja tjita-tjita Bangsa, masjarakat adil dan makmur.

Saudara-saudara sekalian;

Achirlah dalam uraian tertib ekonomi ini ingin kami menjinggung masalah modal asing.

Mengenai penanaman modal asing, kami minta perhatian bahwa modal asing itu sekedar alat pembantu untuk memenuhi kebutuhan kita. Berhasil atau gagalnja perbaikan ekonomi, terutama terletak dipundak kita sendiri. Perlu djuga disadari, bahwa penanaman modal asing itu, memang tidak akan langsung kita rasakan manfaatnja; sebab projek-projek besar jang akan dibiakai dengan modal asing itu baru beberapa tahun kemudian akan memberi hasil njata.

Dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing jang telah kita punjai itu, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sumber kemampuan asing untuk memperlantjar pembangunan ekonomi kita, selama modal nasional, modal domestik belum mampu mengubah sendiri kekajaan alam kita. Sudah djelas, bahwa kita harus memberikan fasilitas jang luas tetapi wadjar terhadap pertumbuhan modal nasional ini.

Kami djuga perlu meminta pengertian Rakjat bahwa dengan adanja penanaman modal asing atau bantuan-bantuan kredit dari negara-negara lain tidak berarti bahwa kita tunduk pada kepentingan asing. Kita mau menerima, dan bahkan meminta bantuan dari manapun datangnja dalam pembangunan ekonomi ini tetapi bantuan itu tidak boleh mengikat kita dengan ikatan-ikatan politik, lebih-lebih mengorbankan kemerdekaan dan kedaulatan kita.

Demikianlah garis-garis besar kebidjaksanaan ekonomi jang akan tetap dipegang oleh Pemerintah untuk masa depan. Garis kebidjaksanaan ini tidak bisa dilihat terlepas dari pada apa jang telah ditjapai dimasa lampau, selama setahun usia Kabinet Ampera ini.

Menilik hasil-hasil jang ditjapai, maka Pemerintah mempunjai penuh harapan dan penuh kepertjajaan bahwa hasil-hasil dimasa depanpun tidak akan mengetjewakan. Akan tetapi dalam mengadjar usaha dan prestasi dimasa depan ini, Pemerintah sadar bahwa kesulitan-kesulitan tjukup besar.

Pemerintah insjaf pula bahwa masih banjak rintangan-rintangan jang perlu dilalui, masih banjak beban jang kelak akan dipikul diatas pundak Rakjat dan Pemerintah.

Meskipun demikian, Pemerintah tetap dengan penuh kesungguhan hati berusaha mengatasi segala kesukaran dan rintangan jang dihadapi. Pemerintah pertjaja bahwa dalam menghadapi tugas dan tantangan jang besar dimasa depan ini, Rakjat pasti akan selalu ikut membantu usaha-usaha Pemerintah.

Sidang DPR-GR jang kami muliakan;

Dalam rangka membina tertib sosial, maka usaha menegakkan kehidupan sosial setjara tertib dan dinamis, bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kebudajaan, kesedjahteraan buruh/pegawai dan sebagainya mendjadi sasaran-sasaran perhatian Pemerintah.

Apabila dilihat dari segi “pembiajaan” tampak seolah-olah perhatian Pemerintah hanja ketjil sadja, maka hal itu semata-mata karena terbatasnja kemampuan keuangan jang tersedia sedangkan Pemerintah harus menentukan prioritas pada bidang-bidang lain terlebih dahulu.

Pembinaan Agama sangat penting, sebab Agama selalu memberi kekuatan iman, memberikan landasan mental dan ketinggian moral. Dalam tata hidup duniawi adjaran-adjaran Agama merupakan unsur mutlak bagi terwujudnja tertib sosial.

Tertib sosial sangat diperlukan, agar masjarakat merasa tenteram baik setjara lahir maupun bathin dimanapun ia berada; agar dengan demikian dapat pula bekerdja dengan giat dan tenang.

Tertib sosial adalah tata-tertib dalam masjarakat jang tumbuh dari kesadaran masjarakat sendiri dengan melaksanakan norma-norma hukum, norma-norma umum, norma-norma agama, norma-norma kesusilaan dan sebagainya. Maka lingkungan masjarakat ditingkat basis seperti desa, RT/RW, kampung-kampung, tempat-tempat rekreasi adalah wadah atau alat jang baik untuk membina tertib sosial ini.

Dalam meletakkan dasar-dasar tertib sosial, kitapun harus melihat djangkauan kedepan kepada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi jang akan datang.

Dalam bidang ini, maka perhatian harus kita tjurahkan pada bidang pendidikan; mulai dari Taman Kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan ialah membentuk warganegara Pantja-Sila jang berkepribadian, berwatak, bermoral luhur, sehat badanijah dan rohanijah, berketrampilan, mampu berdiri sendiri, sehingga nanti mampu meneruskan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita-tjita Bangsa. Untuk itu ketertiban dan kelantjaran pendidikan dan bersekolah perlu ditingkatkan terus. Djuga perlu dikembangkan satu sistim pendidikan jang langsung berdasarkan pada Pantja-Sila. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi harus merupakan satu sistim jang integral. Pendidikan kedjuruan harus lebih diutamakan disesuaikan dengan strategi pembangunan. Untuk ini sebuah RUU Pendidikan telah diadjukan Pemerintah kepada DPR-GR untuk mendapatkan penjelesaian.

Dalam keadaan keuangan negara jang masih serba terbatas sekarang ini; Pemerintah sungguh-sungguh minta bantuan masjarakat untuk setjara bergotong-rojong dapat menambah ruang-ruang beladjar dan gedung-gedung sekolah; sudah barang tentu pengerahan dan penggunaan dana-dana dari Rakjat sematjam ini harus diatur setjara tertib dan tidak boleh terlalu memberatkan masjarakat—orang tua murid—sehingga mengakibatkan anak-anak didik dari orang-orang jang kurang mampu malahan tidak mendapatkan kesempatan pendidikan.

Chusus mengenai nasib guru-guru, Pemerintah menaruh perhatian; setidak-tidaknja akan diusahakan agar guru-guru kita dapat menerima apa jang mendjadi haknja dan tepat pada waktunja.

Erat hubungannja dengan masalah pendidikan adalah kesenian dan kebudajaan; jang menundjukkan ketinggian dan keluhuran budi sesuatu Bangsa. Walaupun Orde-Baru menghargai kebebasan, tetapi hal ini tidak berarti kebebasan tanpa batas. Batas-batas inipun dikenal dalam kegiatan atau manifestasi kesenian dan kebudajaan. Kita hendaknja mengembangkan kepribadian kita sendiri dalam bidang kesenian dan kebudajaan ini; unsur-unsur dari luar, unsur jang bersifat universal, unsur-unsur jang positif boleh kita ambil untuk melengkapi dan menjempurnakan

kesenian dan kebudajaan kita. Sebaliknya djanganlah kita begitu sadja mentjontoh kesenian, kebudajaan dan kebiasaan asing jang tidak sesuai dengan kepribadian kita, jang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan kita, lebih-lebih bial kebudajaan asing itu dinegeri asalnja sendiri djuga mendapat ketjaman-ketjaman dari masjarakatnja. Praktek-prkatek kesenian, kebudajaan dan tingkah laku hidup sehari-hari itupun hendaknja memperhatikan keprihatinan rakjat banjak dewasa ini.

Dalam rangka kesedjahteraan pegawai negeri, buruh dan pradjurit, Pemerintah sedang berusaha sekerasnja untuk mentjarikan djalan keluar sehingga dapat meningkatkan kesedjahteraan itu. Jang djelas adalah bahwa Pemerintah tidak akan begitu gampang menaikkan gadji, sebelum dipertimbangkan setjara masak memperhitungkan untung-ruginja, chususnja bagi pegawai negeri/buruh sendiri.

Saudara-saudara sekalian;

Sehubungan dengan rentjana-rentjana pembangunan jang akan datang, jang akan menitik-beratkan pada bidang pertanian, maka perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan masjarakat desa perlu lebih ditingkatkan dan dikerdjakan lebih sungguh-sungguh dan konkrit. Masjarakat desa merupakan bagian penting dari potensi ekonomi Indonesia, merupakan tenaga-tenaga jang langsung berproduksi, bahkan merupakan bagian masjarakat jang besar djasanja dalam memenangkan perang kemerdekaan jang lalu. Tujuan pokok daripada pembangunan masjarakat desa adalah menaikkan kekuatan produksi jang potensiil dimiliki oleh desa, meningkatkan kesedjahteraan penduduk desa, dalam rangkaian pembangunan ekonomi jang akan datang.

Dalam rangka pembangunan masjarakat desa inilah akan kita usahakan mengatasi masalah tuna-karya dan tuna-susila jang kian hari makin membandjiri kota-kota. Masalah tuna-karya dan tuna-susila akan kita usahakan memetjahnja setjara konsepsionil dan prinsipiil; dengan djalan menghilangkan sebab pokoknja, ialah jang untuk sebagian besar karena kurangnya lapangan kerdja dan ruang gerak di desa-desa asalnja. Tuna-karya dan tuna-susila benar-benar menusuk perasaan kita karena memang merupakan tingkah laku hidup jang tidak sesuai dengan Pantja-Sila.

Sementara menunggu penyelesaian-penyelesaian setjara integral seperti jang kami sebutkan tadi; hendaknja Pemerintah-pemerintah Daerah dan masjarakat jang mampu memberikan perhatiannja untuk menjalurkan mereka kepada usaha-usaha jang produktif.

Sidang DPR-GR jang terhormat;

Dalam rangkaian djangkauan pandangan kedepan, maka kita perlu setjara berani melihat pertambahan djumlah penduduk jang menurut angka-angka perbandingan akan melampaui keseimbangannja dengan produksi jang dapat kita tjukupi, baik dari hasil sendirimaupun dari impor; oleh karena itu kita harus menaruh perhatian jang serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berentjana, jang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pantja-Sila.

Masalah ini adalah prinsipiil, menjangkut kesedjahteraan Rakjat; bahkan menjangkut nasib generasi kita jang akan datang. Oleh karena itu harus diusahakan setjara masak-masak dan berentjana pula.

Saudara-saudara sekalian;

Dalam rangka mewudjudkan tertib-sosial ini, maka kami akan memberikan garis kebidjaksanaan Pemerintah jang berhubungan dengan masalah Tjina. Kepada seluruh Rakjat, kami serukan agar tidak terdjebak kedalam kegiatan-kegiatan jang mendjurus kepada rasialisme.

Kita harus menarik garis jang djelas antara Tjina Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan Tjina.

Warga Negara Indonesia keturunan Tjina, meskipun ia keturunan Tjina, tetapi ia adalah warga negara Indonesia jang mempunjai kedudukan, hak dan kewadiban jang sama. Oleh karena itu harus kita hindari adanja diskriminasi perlakuan terhadap warga negara-warga negara keturunan Tjina ini, baik mengenai hak maupun mengenai kewadajiban. Demikian pula harus kita usahakan untuk menghilangkan tata-pergaulan jang eksklusif didalam lingkungan satu Bangsa; ketentuan untuk mempermudah prosedur pergantian nama adalah salah satu langkah-usaha dalam mempertjepat menghilangkan eksklusivisme ini.

Kami serukan kepada warga negara Indonesia keturunan Tjina untuk tidak menunda-nunda lagi ber-integrasi dan berasimilasi dengan masjarakat Indonesia (asli). Saudara-saudara hendaknja sadar, bahwa Saudara-saudara telah memilih dengan sukarela tanpa paksaan kewarga-negaraan Indonesia, sehingga Saudara-saudara bukan sadja diberi persamaan hak tetapi Saudara-saudara dituntut pula memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang sama sebagai warga negara itu. Berintegrasi dan berasimilasi berarti ikut serta dalam segala kegiatan Rakjat Indonesia bersama-sama segala suka dan dukanja. Dengan demikian setjara fisik dan mental tidak ada lagi tirai pemisah antara Warga Negara keturunan Tjina ini dengan Warga Negara Indonesia (asli).

Terhadap Tjina Warga Negara Asing, maka tetap akan diberikan perlakuan seperti jang diberikan kepada Warga Negara Asing lainnja sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional jang berlaku, tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha subversi dan infiltrasinja.

Pimpinan DPR-GR dan Sidang jang terhormat;

Dalam usaha kita bersama untuk melaksanakan kemurnian Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, maka mewujudkan tertib-hukum adalah satu tugas jang sangat penting dan prinsipiil.

Falsafah Pantja-Sila bertolak dari kesamaan manusia berdasarkan harkat dan martabatnja sebagai makhluk Tuhan.

Salah satu azas dan sendi Undang-undang Dasar 1945 adalah azas dan sendi negara hukum; jang berarti bahwa didalam negara kita ini hukum-lah jang berkuasa bukan kekuasaan.

Menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan adalah merupakan salah satu masalah pokok jang mendjadi tugas Orde-Baru; jang berarti setiap orang, setiap pedjabat bahkan Pemerintah dan aparaturnya sendiri pada prinsipnja harus tunduk kepada hukum jang berlaku.

Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, bukan sadja untuk memenuhi tuntutan-tuntutan idiil tetapi djuga untuk memenuhi tuntutan-tuntutan praktis. Dalam

rangka menegakkan Pantja-Tertib, maka tertib-hukum ini menempati peranan yang sangat penting. Pelaksanaan hukum yang benar-benar adil dan tepat mempunyai aspek pendidikan yang mendalam bagi masyarakat, sehingga benar-benar dapat timbul ketertiban dalam masyarakat.

Ketertiban yang timbul bukan karena paksaan, melainkan ketertiban yang timbul dan dipelihara oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus diabdikan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan rakyat banyak terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan. Dengan demikian, masyarakat akan tahu dan menjalankan apa yang menjadi haknya; dan sebaliknya, tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum inilah yang harus diwujudkan dalam tertib hukum; sehingga orang merasa tenang, merasa dilindungi, tidak akan diganggu hak-haknya; sehingga orang pun akan dengan tenang pula menjalankan kewajibannya, menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Hukum yang dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum baik pada tingkat pengusutan, penuntutan maupun pengadilan haruslah hukum yang mentjerminkan kesadaran hukum rakyat, hukum yang menjamin tuntutan keadilan rakyat, hukum yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat, sehingga dipertajai dan disegani oleh rakyat, karena kewibawaannya dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum setjara tepat dan teguh, yang didasarkan pada penilaian yang seadil-adilnya.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengandjurkan agar masyarakat, khususnya aparaturnegara dan alat-alat keamanan turut membantu kelantjaraan pelaksanaan hukum melalui pengadilan. Keputusan-keputusan pengadilan harus dijamin pelaksanaannya untuk menjaga kewibawaan dan kepastian hukum itu.

Sebaliknya kita harus berusaha dan mendorong agar supaya setiap persoalan dan pelanggaran hukum dapat diselesaikan menurut saluran hukum dan pengadilan; kita harus sedjauh mungkin mengachiri praktek-praktek ingin menjelesaikan suatu perkara dengan main hakim sendiri, yang sebenarnya praktek sematjam itu, juga merupakan pelanggaran hukum.

Sudah dengan sendirinja aparaturnya penegak hukum, khususnya aparaturnya pengadilan harus terus disempurnakan, baik jumlahnya, maupun personalianya yang harus memenuhi persyaratan mental dan moral yang menjamin terselenggaranya hukum dan keadilan.

Dalam rangka menegakkan hukum, dalam usaha Pemerintah untuk menindak para pelanggar hukum, tindakan-tindakan Pemerintah mengambeg-parama-arta-kan bidang-bidang yang erat hubungannya dengan usaha mensukseskan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu perhatian ditunjukkan pada pemberantasan dan penindakan tegas terhadap penjelundupan dan penjelewengan-penjelewengan yang menghambat usaha-usaha Pemerintah tersebut. Kepada aparaturnya penegak hukum, Pemerintah telah menginstruksikan untuk meningkatkan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggar-pelanggar hukum, terutama pelanggar-pelanggar yang menghambat usaha-usaha mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, disamping usaha-usaha penjemputan administrasi dan prosedur yang dapat menjegah dilakukannya tindakan-tindakan penjelewengan tersebut.

Prosedur-prosedur dibidang ekonomi yang tidak lagi birokratis, larangan pungutan liar, larangan tjampur tangan dari aparaturnya Pemerintahan manapun yang tidak berhak mengurus soal-soal ekonomi, pembentukan Team Penertiban Keuangan Pusat, adalah usaha-usaha pokok Pemerintah untuk memberantas korupsi dan mengembalikan uang Negara yang berada ditangan pihak-pihak yang tidak berhak.

Demikianlah kebijaksanaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membina tertib hukum, yang setapak-demi-setapak telah kelihatan hasilnya.

Saudara-saudara sekalian;

Kami kini akan menjelaskan masalah-masalah dibidang tertib Hankam yang dihubungkan sekaligus dengan konsepsi Han/Kam Nas.

Sidang Umum ke-IV MPRS telah menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan dalam bidang Pertahanan-Keamanan seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XXIV. Ketetapan itu menegaskan beberapa hal yang prinsipil sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.
2. Dwi fungsi ABRI sebagai alat negara dan sebagai alat Revolusi atau kekuatan Sosial;
3. Kekayaan anggota ABRI.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS itu, maka kini tengah disiapkan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan; sedangkan pada akhir tahun 1966 sebuah Seminar Hankam telah menghasilkan doktrin Hankam Nasional serta Doktrin Perdjjuangan ABRI yang diberi nama TJATUR DHARMA EKA KARMA, yang setjara integral telah merumuskan landasan idiil, azas-azas serta pedoman pelaksanaan Hankam Nasional dan Kekayaan ABRI.

Dengan Doktrin tersebut maka djelaslah bagaimana konsepsi Bangsa kita mengenai pelaksanaan HANKAMNAS dan mengenai tugas ABRI baik didalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Hankamnas maupun pada bidang-bidang non-HANKAM. Mendjadi djelas pula hakekat daripada Dwi fungsi ABRI, yakni sebagai alat HANKAM dan sebagai golongan Karya.

Menurut doktrin tersebut, yang harus dipertahankan dan diamankan oleh ABRI adalah ideologi Pantja-Sila, segala hasil perdjjuangan yang telah ditjapai pada segala bidang, kemerdekaan, kedaulatan dan integritas negara, persatuan dan kesatuan wilayah dan Bangsa Indonesia serta nilai-nilai kehidupan dan kepentingan Nasional. Dengan menjadari hakekat antjaman baik dari luar maupun dari dalam serta segala aspek yang ada hubungannya dengan Hankamnas, maka politik Hankamnas adalah defensif-aktif dan pada dasarnya berkewajiban:

1. *Setjara Nasional:*
 - a. Mengamankan konsolidasi dan pembangunan Republik Indonesia sebagai modal pokok perdjjuangan Bangsa dalam mentjapai tjita-tjita Revolusi,
 - b. Menjusun dan mengembangkan kekuatan Hankamnas yang mampu menanggulangi antjaman-antjaman dalam segala bentuk dan

manifestasinja dan dari manapun datangnja. Sedangkan potensi Hankamnas tersebut merupakan perpaduan jang serasi antara sistim-sendjata sosial (sissos) dan sistim-sendjata teknologi (sistek).

2. *Setjara Internasional:*

- a. Mengadakh kerdja-sama regional serta membentuk dan mewujudkan kestabilan diwilajah Asia Tenggara;
- b. Mengusahakan adanja kerdja-sama internasional dalam rangka perdjungan untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja dan dari manapun datangnja.

Setalah Sidang Umum ke-IV MPRS dan Pembentukan Kabinet Ampera, tugas Hankamnas dihadapkan pada dua karya pokok, yakni:

1. Karya ikut serta mensukseskan Strategi Dasar Kabinet Ampera;
2. Karya mengamankan keseluruhan Strategi Dasar Kabinet Ampera.

Karya ikut serta mensukseskan Strategi Dasar Kabinet Ampera diselenggarakan dengan dua usaha pokok yakni:

- a. Menegakkan dan membina Orde-Baru, sehingga dapat disusun daerah pangkal Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945, agar selanjutnja Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diselamatkan dan diamankan setjara murni dan konsekwen;
- b. Mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.

Karya mengamankan Strategi Dasar Kabinet Ampera diselenggarakan dengan dua usaha pokok pula, yakni:

- a. Rehabilitasi dan konsolidasi potensi dan kekuatan Hankamnas dilapangan ideologi, psychologi, politik, ekonomi, sosial budaja dan militer, serta penjelesaian penumpasan sisa-sisa G-30-S/PKI, Orde-Lama dan kontra-revolusi lainnja, termasuk subversi-infiltrasi dan pemberontakan;

- b. Kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi serangan-serangan mendadak dan terbuka, baik dari luar maupun dari dalam, ataupun setjara gabungan luar-dalam, serta membantu negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam mendjamin keamanan dan perdamaian bersama.

Berdasarkan landasan-landasan diatas, dan terutama untuk dapat ikut mensukseskan pelaksanaan program-program Kabinet Ampera, maka segenap slagorde ABRI pertama-tama harus melakukan redisiplinering kembali. Redisiplinering ABRI berarti harus dipatuhinja kembali semua tata-tertib ABRI baik didalam kesatrian, tata-tertib dalam kesatuan-kesatuan maupun tata-tertib ABRI ditempat-tempat umum. Tindakan-tindakan atau tingkah laku jang menjjinggung perasaan Rakjat, bertindak sewenang-wenang, harus diachiri selekas mungkin.

Setiap anggota ABRI harus sadar, bahwa ABRI tidak lain adalah Rakjat biasa jang diberi kepertjajaan memakai pakaian seragam dan memanggul sendjata.

Redisiplinering ABRI berarti pula bahwa anggota-anggota ABRI harus mematuhi dan tunduk kepada peraturan-peraturan umum jang berlaku, disamping tambahan khusus, harus tunduk dan patuh kepada hukum disiplin dan hukum pidana jang berlaku khusus terhadap anggota ABRI. Redisiplinering anggota-anggota ABRI akan sangat besar pengaruhnja dan dapat mendjadi tjontoh bagi ketertiban masjarakat pada umumnja.

Dalam rangka tindakan-tindakan pengamanan kedalam tubuhnja sendiri, maka ABRI harus tetap waspada dan melakukan pembersihan-pembersihan kedalam slagordenja terhadap sisa-sisa pengikut G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

Demikian pula ABRI harus tetap melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI jang masih melakukan pengatjauan dalam masjarakat. Pengatjauan gerombolan komunis Tjina didaerah Kalimantan Barat hendaknja merupakan peringatan bagi kita, bahwa bahaya terhadap Pantja-Sila masih mengantjam. Agar pengatjauan ini tidak meluas, maka kepada kesatuan-kesatuan

ABRI setempat telah diperintahkan untuk segera menumpas gerombolan ini, walaupun djumlahnja hanja beberapa ratus orang sadja.

Tugas-tugas keamanan telah pula diselesaikan oleh kesatuan-kesatuan ABRI di Irian Barat, jaitu dengan telah berhasil ditumpasnja gerombolan bersendjata jang masih menginginkan kembalinja pendjadjahan didaerah itu.

Republik Indonesia akan mematuhi kewadajibannja sebagai anggota PBB untuk menjelenggarakan “free choice” pada tahun 1969 di Irian Barat. Akan tetapi kitapun wadajib membantu Rakjat didaerah itu, dalam usaha perwujudan tekadnja untuk tetap dapat merupakan bagian dari Rakjat Indonesia dan daerah jang tak terpisahkan dari wilajah kesatuan Republik Indonesia, seperti jang berulang kali telah mereka tegaskan dalam pernjataan-pernjataan mereka.

Dalam rangka usaha stabilisasi ekonomi, serta dalam rangka usaha menegakkan tertib-ekonomi dan tertib hukum, maka kepada ABRI djuga ditugaskan untuk menumpas dan memberantas segala bentuk penjelundupan jang dilakukan oleh sipapun djuga.

Kemampuan tenaga dan peralatan jang dimiliki oleh ABRI perlu dikerahkan untuk melakukan Operasi Karya; terutama guna rehabilitasi daerah, perbaikan prasarana dan pembukaan daerah-daerah baru. Dengan demikian ABRI dapat memelopori peningkatan produksi dan djasa jang belum mampu dilakukan oleh Rakjat sendiri.

Rintisan jang telah dimulai oleh Operasi Karya ABRI itu dapat dilandjutkan oleh Rakjat sendiri untuk meningkatkan usaha-usaha berproduksi.

Pimpinan dan para Anggota DPR-GR jang terhormat;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan programnja, Pemerintah sedjak semula sadar akan perlu dan pentingnja aparatur jang sehat, kuat, berwibawa, bekerdja dengan efektif dan efisien.

Penertiban aparatur ini sudah sedjak semula diusahakan oleh Kabinet Ampera, bahkan telah dimulai sedjak fase penjelamatan.

Langkah-langkah untuk mendudukan kembali Lembaga-lembaga Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi djuga telah banjak dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan mengindahkan putusan-putusan dari MPRS.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1966, telah disempurnakan dan diperlengkapi susunan MPRS dan DPR-GR, sehingga golongan-golongan jang sebelumnya belum diwakili didalam Lembaga-lembaga perwakilan Rakjat, memperoleh kesempatan menjalurkan setjara konstitusionil.

Demikian pula penjusunan kembali Dewan Pertimbangan Agung sesuai dengan Undang-undang jang baru, sedang dalam pemasakan untuk pada waktunja dapat bekerdja melaksanakan fungsinja setjara efektif. Kemudian BAPPENAS, sambil menunggu Undang-undangnja telah disempurnakan organisasinja untuk memperlantjarkan pelaksanaan tugasnja jang sangat penting untuk menjelenggarakan pembangunan Nasional selandjutnja.

Lembaga-lembaga jang dinjatakan oleh MPRS sebagai Lembaga ekstra-konstitusionil telah ditiadakan seperti Front Nasional, KOTRAR, Panitia Pembina Djiwa Revolusi, BAMUNAS dan lain-lain.

Demikian pula KOTI dan PEPELDA jang merupakan alat dari Pemerintah jang berdaja-guna dalam mengamankan berbagai program Pemerintah, telah dibubarkan sesuai dengan putusan MPRS. Sekarang Penguasa di Daerah sepenuhnya ada pada Gubernur/Kepala Daerah, meskipun masih diperlukan adanja “bijstand” dari kekuatan-kekuatan ABRI untuk mengamankan pelaksanaan tugas-tugasnja di Daerah.

Dewasa ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk meneruskan langkah-langkah penjesuaian dan penertiban Badan-badan dan Lembaga-lembaga sesuai dengan ketentuan MPRS pula, seperti pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jang menjatukan Lembaga Research Nasional dan Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia; Lembaga-lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, Lembaga Pertahanan Nasional dan lain-lain Lembaga jang berdiri sendiri, sekarang sedang dalam pengolahan untuk disesuaikan kedudukannja sesuai dengan kondisi dan konstelasi Kabinet Ampera sekarang ini.

Sebagai warisan dari pada aparat seratus Menteri, haruslah disadari sepenuhnya, bahwa keseluruhan aparat pemerintahan terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan yang efisien dari pada tugasnya; prosedur bekerjanya terlalu berbelit-belit dan bersimpang-siur, sehingga bahkan menjadi hambatan pelaksanaan tugasnya sendiri.

Volume pekerjaan tiap-tiap Departemen, jabatan, dinas-dinas, instansi-instansi dan unit-unit administrasi tidak merata. Kenyataan-kenyataan ini mengakibatkan keseluruhan administrasi negara tidak dapat bekerja setajara efektif dan efisien. Demikianlah gambaran umum keadaan aparat Pemerintahan pada waktu Kabinet Ampera ini menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu tindakan peng-efisiensi-an dalam bentuk reorganisasi dan penjederhanaan prosedur-kerja, telah dilakukan dan akan terus dilakukan. Dengan pengurangan jumlah Departemen dari seratus menjadi dua puluh empat, mau tidak mau mempunyai akibat pula dalam penjederhanaan organisasi Pemerintahan pada umumnya.

Dalam rangka penjederhanaan prosedur-kerja, maka Pemerintah menggariskan kebijaksanaan sentralisasi dalam perentjanaan dan pengawasan; serta dekonsentrasi dan desentralisasi dalam pelaksanaan.

Penertiban dan penjederhanaan hubungan kerja antara Pusat dan Daerah telah diusahakan dengan menjederhakan hubungan kerja antara Gubernur/Kepala Daerah dengan instansi-instansi vertikal yang ada di Daerah.

Demikian pula penserasian pengendalian atas Daerah-daerah telah pula diusahakan oleh Pemerintah melalui Musjawarah Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pedjabat-pedjabat Daerah dalam akhir bulan Djuli yang lalu; yang juga berkenan dihadiri oleh Bapak Ketua MPRS dan Bapak Ketua DPR-GR.

Hasil Musjawarah Kerja ini, telah menekankan pentingnya dilaksanakannya kembali tertib-pemerintahan; yang berarti bahwa setiap aparat harus melaksanakan bidang tugas masing-masing dan bertanggung-djawab akan pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dengan sendirinya

tidak mengurangi prinsip Pemerintahan berdasarkan Pantja-Sila, jaitu kekeluargaan dan gotong-rojong.

Dalam bidang personil, Pemerintah ingin menegaskan, bahwa tindakan pengurangan pegawai dibidang-bidang tertentu perlu dilakukan, tanpa menimbulkan problem sosial baru, ialah pengangguran, tetapi akan lebih ditekankan kepada usaha memindahkan mereka keusaha-usaha jang produktif dan efisien. Kepada para pegawai Negeri dan pegawai PN-PN jang merupakan bagian jag kelebihan, kami mintakan kesadaran dan pengertian untuk dengan semangat dan kemauan haru menyesuaikan dengan kebidjaksanaan ini. Pemerintah pasti tidak hendak mendjerumuskan Saudara-saudara warga pegawai kedalam penderitaan jang lebih dalam; tetapi tindakan ini djustru dilakukan untuk dapat keluar dari masalah in-efisiensi aparatur Pemerintahan, demi kepentingan kita semua, termasuk warga Pegawai.

Disamping itu penertiban personil dari unsur-unsur G-30-S/PKI jang telah didjalankan sedjak tahun 1965 berdasarkan Instruksi dan garis kebidjaksanaan jang ada harus dilandjutkan, jang pelaksanaannja harus benar-benar didasarkan pada kenyataan dan indikasi jang objektif; tidak didasarkan atas dugaan-dugaan jang belum pasti atau ditjari-tjari; jang dapat mengakibatkan tiadanja kepastian hukum.

Pimpinan dan para Anggauta DPR-GR;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Demikianlah masalah-masalah pokok jang ingin kami djelaskan pada kesempatan ini jang sekaligus pula kami laporkan langsung kepada seluruh Rakjat Indonesia.

Kesempatan ini, akan kami gunakan pula untuk atas nama kami sendiri dan atas nama Pemerintah, menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaan jang setinggi-tingginja kepad DPR-GR atas kedja-sama jang telah diwujudkan antara Dewan ini dengan Pemerintah sesuai dengan djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945. memang, kerdja-sama ini belum sempurna;

seperti djuga masih banjak masalah-masalah dan tugas-tugas lain jang harus kita sempurnakan bersama.

Tanpa bermaksud mengelakkan tanggung-djawab atas penilaian tugas-tugas Pemerintah oleh Rakjat; maka Pemerintah berpendapat, bahwa itkad jang baik, kemauan jang sungguh-sungguh, usaha dengan bekerdja keras kiranja merupakan permulaan jang baik. Memang, itikad dan kemauan sadja belum cukup dan tidak akan membawa perbaikan; haruslah diusahakan agar itikad dan kemauan itu dapat terwujudkan dalam hasil-hasil jang konkrit dan positif.

Satu hal jang diminta oleh Pemerintah, agar hasil-hasil itu dinilai dengan objektif dan wadjar; jaitu dilihat dari keadaan umum jang dihadapi oleh Kabinet ini pada permulaan tugasnja dan tugas-tugas pokok jang dibebankan oleh MPRS kepada Kabinet Ampera.

Kepada DPR-GR, wakil-wakil Rakjat, kami menjampaikan terima kasih jang sebesar-besarnja atas kepertjajaan jang diberikan kepada kami seperti jang ditegaskan dalam Resolusi DPR-GR tanggal 29 Djuli 1967 tentang follow-up pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIII.

Insja Allah kami akan dapat memenuhi harapan Saudara-saudara.

Mendjelang achir laporan ini, kami ingin menjampaikan pesan-pesan langsung kepada Rakjat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Apa jang dapat kita tjapai sekarang memang belum banjak jang dapat kita rasakan langsung. Setjara sederhana Pemerintah ingin Rakjat dapat hidup lajak, mampu membeli sandang-pangan jang Saudara-saudara butuhkan, dapat bekerdja dengan tenang, anak-anak dapt bersekolah dan sebagainya.

Untuk masa sekarang keinginan-keinginan Rakjat jang djuga mendjadi keinginan Pemerintah itu memang belum terpenuhi; mudah-mudahan dalam tahun-tahun jang akan datang sudah dapat kita nikmati bersama hasilnja.

Kita sekarang sedang bergulat sekuat tenaga untuk memperbaiki perekonomian kita, mengatur kembali rumah-tangga negara kita; jang sudah terlandjur morat-marit bertahun-tahun.

Kami telah melaporkan pelaksanaan tugas jang dibebankan kepada Pemerintah oleh Rakjat; kami telah memberi petunjuk-petunjuk tentang apa jang akan kita djalankan; kami telah memberi gambaran tentang apa jang akan kita tjapai pada tahun-tahun jang akan datang.

Marilah kita terus berusaha dan bekerdja keras dalam bidang kita msing-masing. Program kita sudah djelas, jaitu apa jang telah ditetapkan oleh MPRS, wakil-wakil Rakjat sendiri.

Djangan kita terpengaruh oleh desas-desus. Djangan kita dapt diadombakan oleh gerpol sisa-sisa bekas G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

PKI telah djelas bermaksud menghantjurkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde-Lama djelas telah menjelewengkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

PKI dan Orde-Lama kedua-duanja djelas menjelewengkan tjita-tjita kemerdekaan, menjelewengkan kemurnian tjita-tjita Rakjat.

Kita telah menjelamatkan kemerdekaan dengan berpegang teguh kepada Pantja-Sila; marilah kita isi Orde-Baru dengan kesaktiannja Pantja-Sila.

Marilah kita isi Orde-Baru ini dengan menegakkan azas dan sendi Negara hukum, azas dan sendi demokrasi.

Orde-Lama tidak boleh kembali lagi dan tidak akan kembali lagi. Siapapun jang akan mengembalikan Orde-Lama berarti mengingkari kemurnian tjita-tjita kemerdekaan, mengingkari tjita-tjita 17 Agustus 1945. oleh karena itu, siapapun jang akan mengembalikan kekuasaan Orde-Lama pasti akan kita tindak dengan tegas.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;

Kita menegakkan Orde Baru karena kita menghendaki perbaikan keadaan, perbaikan hanja dapt kita adakan sendiri degan bekerdja keras. Oleh karena itu marilah kita tidak hanja banjak berbitjara, tetapi lebih banjak bekerdja. Bekerdja

untuk mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya, bekerdja keras untuk kemenangan Orde-Baru.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta, 16 Agustus 1967,

Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO

Djenderal T.N.I.